

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 14 DAN 30 NOVEMBER 2018



TENTANG RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2019

Hari : Rabu
Tanggal : 14 November 2018
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
 2. Penjelasan Bupati tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2018;
 3. Skors (Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi);
 4. Penyampaian pandangan umum fraksi atas Raperda APBD Tahun 2019;
 5. Skors (Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi);
 6. Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun 2019;
 7. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 44 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 32 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 12 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Rabu tanggal 14 November 2018, kita dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam

rangka Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 dalam keadaan sehat wal-afiat.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Amanat Pasal 107 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa *“Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD ”*.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 33 orang.

Dengan demikian, kuorum Rapat Paripurna hari ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucap *“Bismillahirrohmanirrohim”* tepat pukul 12.15 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019 sangat erat hubungannya dengan RKPD Tahun 2019 serat KUA-PPAS Tahun 2019, dengan mengacu pada :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; dan,
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa satu tahun anggaran yang terdiri dari rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan, baik menyangkut kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna ini sebagaimana yang diagendakan oleh Badan Musyawarah bersama TAPD Kabupaten Rembang pada rapat tanggal 13 November 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
3. Skors (Penyusunan pemandangan umum fraksi);
4. Penyampaian pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
5. Skors (Penyusunan jawaban bupati);

6. Jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
7. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua dalam rapat paripurna hari ini yaitu *"Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019"*.

Kepada Saudara Bupati Rembang, waktu dan tempat dipersilahkan.

**=== PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2019 ===**

- *(Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 terlampir).*

Terima kasih Saudara Bupati atas penjelasannya.

Peserta rapat dan hadirin yang berbahagia,

Demikian telah kita ikuti dan dengar bersama Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Dari penjelasan Bupati ini, akan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Namun sebelumnya, perlu kita berikan waktu kepada masing-masing fraksi dalam menyusun pemandangan umumnya. Untuk itu rapat paripurna saya skors selama 10 (sepuluh) menit.

(Ketuk palu 1 kali)

=== SKORS ===

Waktu yang diberikan kepada masing-masing fraksi dalam menyusun pemandangan umum telah habis, maka skors saya cabut dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita ikuti acara ketiga yaitu Penyampaian pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Untuk kelancarannya, kepada anggota yang telah ditunjuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi, saya persilahkan menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Muh. Anshori
2. Fraksi Demokrat : Sdr. Mugiyarto, S.T.
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Drs. H.Muh. Subawoto
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdr. Nanik Sri Sundari
5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : Sdr. H. Yudianto, S.H.
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. Ali Imron Wahyudi
7. Fraksi Harapan : Sdr. Sukarmain

Secara berurutan dimulai Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan.

===== **PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI** =====

➤ *(Penyampaian pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 terlampir)*

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Acara berikutnya, yaitu Jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Namun sebelumnya, perlu kita berikan waktu kepada Saudara Bupati dalam menyusun jawaban tersebut. Untuk itu rapat paripurna saya skors kembali selamamenit.

(Ketuk palu 1 kali)

===== SKORS =====

Waktu skors untuk menyusun jawaban bupati telah habis, maka skors saya cabut, dan rapat paripurna kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita ikuti acara selanjutnya yaitu Jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

===== JAWABAN BUPATI =====

- *(Jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 terlampir)*

Terima kasih Saudara Bupati atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Acara demi acara yang menjadi agenda dalam rapat paripurna hari ini telah kita lalui, maka berakhir sudah acara rapat pada hari ini. Kami atas nama pimpinan rapat mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kehadirannya dan selamat bertemu kembali pada rapat paripurna kedua dalam membahas Raperda APBD Tahun Anggaran 2019 pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018.

Akhirnya, dengan mengucap "*Alhamdulillahirobbil 'alamiin*" tepat pukul 16.00 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

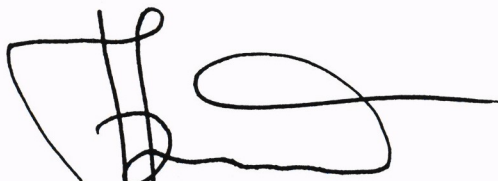
(Ketuk palu 3 kali)

Sekian. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS, /



Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
APBD TAHUN ANGGARAN 2019**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , OPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pengantar Nota Keuangan tentang Raperda
APBD Tahun Anggaran 2019;
- LAMPIRAN III : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap
Raperda APBD Tahun Anggaran 2019;
- LAMPIRAN IV : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum
Fraksi- Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun
Anggaran 2019;

TENTANG RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

HARI/TANGGAL : RABU, 14 NOVEMBER 2018

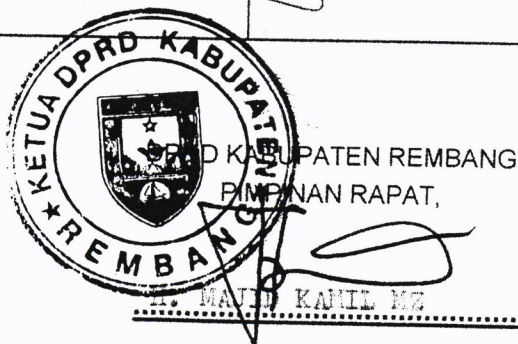
PUKUL : 09.00 WIB

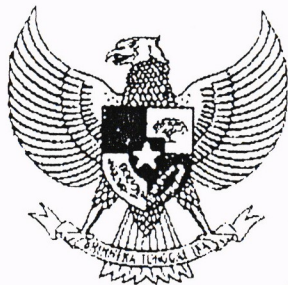
NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	12	
13	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	13	
14	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	14	
15	H. ISLAHUDDIN	Anggota	15	
16	H. HARNO, S.E.	Anggota	16	
17	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	17	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
18	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	18	
19	MOHAMMAD IMRON	Anggota	19	
20	ILYAS	Anggota	20	
21	SHOLEH, B.A	Anggota	21	
22	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	22	
23	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	23	
24			24	

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
24	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25
25	JASMANI	Anggota	26
26	WIDODO	Anggota	27
27	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28
28	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30
30	FRIDA IRIANI	Anggota	31
31	SUSTIYONO	Anggota	32
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
32	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33
33	H. CHASANUDDIN	Anggota	34
34	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35
35	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36
36	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
37	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38
38	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39
39	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40
40	ALI IMRON WAHYUDI	Anggota	41
FRAKSI HARAPAN			
41	SUKARMAIN	Anggota	42
42	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43
43	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44
44	NUR JANNAH	Anggota	45

Keterangan :

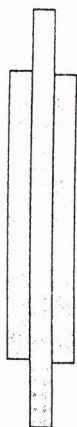
- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar





P E N G A N T A R
NOTA KEUANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG



TAHUN ANGGARAN
2019



BUPATI REMBANG

PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;

Yang saya hormati, Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi, LSM, Rekan Media dan tamu undangan yang berbahagia.

Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT, kita dapat menghadiri rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Di kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Legislatif atas berbagai masukan yang telah diberikan selama pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 dan akhirnya telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Insya Allah, apa yang kita usahakan bersama ini bermanfaat bagi pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang.

Tujuan utama Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah Memperkuat Sinergitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah untuk Pengembangan Potensi Wilayah, serta pemenuhan Layanan Pendidikan dan Kesehatan guna Perwujudan Pemerintahan yang Amanah.

Pembahasan RAPBD ini diharapkan tetap dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif guna mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan, sesuai dengan kebijakan pembangunan tahun 2019 yang bertemakan ***“Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Menuju Masyarakat yang Berdaya Saing, Inovatif dan Kreatif ”*** dengan fokus pembangunan yaitu :

- Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan;
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- Penurunan angka kemiskinan;
- Percepatan pertumbuhan ekonomi;
- Perluasan kesempatan kerja;
- Kualitas infrastruktur;
- Perwujudan *Good Governance*.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 antara lain sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Dasar (SD)
2. Dana BOS
3. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
4. Pembangunan jalan dan jembatan
5. Rehabilitasi jaringan irigasi
6. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah
7. Penataan lingkungan permukiman
8. Pembangunan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani
9. Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan

10. Pengelolaan TPI terpadu
11. Pembangunan pasar
12. Pengembangan destinasi pariwisata
13. Progran Keluarga Berencana
14. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan komitmen dan ketaatan Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, struktur Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Kebijakan Penganggaran Pendapatan Daerah dalam RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan telah memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019 Pendapatan Daerah direncanakan mencapai Rp.1,82 Trilliun. Jumlah ini naik 0,43% dari target pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2018 sebesar Rp.1,81 Trilliun.

Rencana Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1,82 Trilliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.292 milyar, Dana Perimbangan sebesar 996 milyar dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.536 milyar.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang berupaya terus meningkatkan kualitas belanja daerah secara menyeluruh. Total belanja daerah sebesar Rp.1,86 Trilliun, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.1,06 Trilliun dan Belanja Langsung sebesar Rp.802 Milyar.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk **Bidang Pendidikan**, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan **20% lebih** dari belanja daerah. Dalam RAPBD Kabupaten Rembang TA. 2019 Belanja Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga) sebesar Rp.534 Milyar, atau **28,60%** dari total Belanja Daerah.

Demikian juga untuk **Bidang Kesehatan**, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal **10%** dari total belanja APBD diluar gaji. Dalam RAPBD Kabupaten Rembang TA. 2019 Belanja Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp.188 milyar atau 15,43% dari total belanja daerah diluar gaji.

3. Pembiayaan Daerah :

Pengeluaran pembiayaan daerah dalam RAPBD TA 2019 untuk penyertaan modal Daerah sebesar Rp. 3 Milyar, pada PDAM

Berikut kami sampaikan ringkasan Rancangan PERDA tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 :

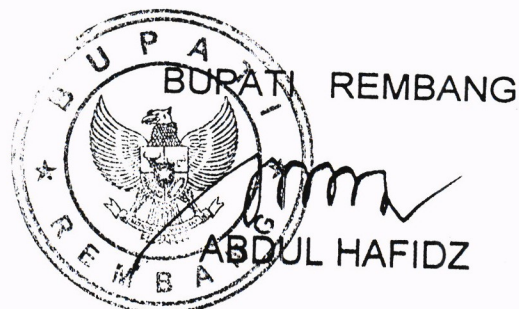
Uraian	Jumlah
PENDAPATAN DAERAH	1.824.643.132.071
Pendapatan Asli Daerah	292.232.323.071
Pendapatan Pajak Daerah	96.850.500.000
Hasil Retribusi Daerah	23.158.499.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.030.000.000
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	162.193.324.071
Dana Perimbangan	996.263.048.000
Dana Transfer Umum	818.494.977.000
Dana Transfer Khusus	177.768.071.000
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	536.147.761.000
Hibah	58.432.800.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	90.000.000.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	228.728.361.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	158.986.600.000
BELANJA	1.867.195.680.914
Belanja Tidak Langsung	1.064.374.452.205
Belanja Pegawai	646.395.126.605
Belanja Bunga	1.131.632.000
Belanja Hibah	46.944.600.000
Belanja Bantuan Sosial	4.912.160.000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11.944.474.900
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	352.046.458.700
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
Belanja Langsung	802.821.228.709
Belanja Pegawai	162.577.010.350
Belanja Barang dan Jasa	292.441.588.984
Belanja Modal	347.802.629.375
SURPLUS / (DEFISIT)	(42.552.548.843)
PEMBIAYAAN DAERAH	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	49.420.916.843
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	49.420.916.843
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.868.368.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang	3.868.368.000
PEMBIAYAAN NETTO	42.552.548.843
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-

Hadirin Sidang Dewan yang Saya Hormati,

Demikian telah kami sampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, Saya berharap untuk segera dibahas secara mendalam, obyektif dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 ini dapat ditetapkan sesuai tahapan penganggaran selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 17 Oktober 2018





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2019

Rabu , 14 Nopember 2018

Dibacakan oleh : MOCH. ANSORI, SH

Assalamu a'laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat siang , dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

Alhamdulillah , asholatu wassalamu a'la Rosulillah S.A.W , Wa'ala alihi wosohbihi wamawwalah , Laa hauia walaa quwwata illa billah.. , Amma ba'da ...

Yang kami hormati :

=> Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
 - => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
 - => Sdr. Kepala Pengadilan dan Kepala Kejaksaan Kabupaten Rembang.
 - => Sdr. Sekretaris daerah, Asisten sekda, Kepala Bagian, Kepala Kantor, Kepala Badan, dan Sdr Camat se-kabupaten Rembang.
 - => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf. Dan...
 - => Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan..
- semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami menyampaikan pemandangan umum ini, terlebih dahulu marilah kita, tak henti-hentinya selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir dalam Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW., yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya sampai di yaumi qiyamah.

Hadirin.., Sidang Dewan yang kami hormati...,

Mengawali penyampaian pemandangan umum ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, yang selalu harus tetap bekerja keras, untuk menyelesaikan kegiatan APBD tahun 2018, dengan sisa waktu efektif yang tinggal 41 hari lagi harus berakhir. Dan khususnya kepada TAPD, kami juga memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerjanya, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2019 ini dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan, untuk segera dilakukan pembahasan.

Sidang Dewan yang terhormat.....,

Selanjutnya, setelah mendengarkan paparan penjelasan sdr Bupati, tentang Nota Keuangan RAPBD 2019 beberapa menit yang lalu, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, pada kesempatan yang baik ini, memberikan beberapa catatan, sebagai pemandangan Umum kami, antara lain sebagai berikut :

1. Terkait adanya Kerjasama antara Pemkab Rembang dengan PTN Undip Semarang dibidang Pendidikan, yang merupakan inisiatif sdr. Bupati, untuk membuka Program Pendidikan Di luar Kampus Induk, dan bertempat di Rembang. Hal ini akan membawa dampak yang sangat positif bagi Pemkab dan Masyarakat Rembang, khususnya bagi kalangan keluarga yang kurang mampu dan berprestasi, baik dari aspek Sosial maupun Ekonomi masyarakat. Berkenaan dengan Program tersebut, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyambut baik dan positif kepada sdr Bupati dan Pemkab Rembang, atas kerjasama tersebut selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan hal ini menunjukkan adanya komitmen terhadap program memajukan pendidikan di Rembang, dalam rangka peningkatan kualitas Sumber daya Manusia di kabupaten Rembang, sehingga kedepan Rembang tidak ketinggalan dengan daerah tetangga yang sudah lebih maju.
2. Terkait dengan pelayanan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk warga masyarakat yang tidak mampu/warga miskin, terkait tentang pelayanan beras sejahtera (Rastra), kami Fraksi PPP, memperhatikan usulan dari beberapa Pempdes dan mengusulkan, agar Pemkab Rembang dapat mengoptimalkan BUMDES di masing-masing desa, untuk menyalurkan Rastra tersebut, yang berfungsi sebagai pelayanan program E-Warung, selama tidak menyimpang dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Terkait THL di seluruh seluruh OPD, khususnya di TPI/PPI Fraksi PPP mengusulkan adanya tambahan penghasilan, karena kinerja mereka cukup berat dikarekan target retribusi yang cukup tinggi sehingga menuntut kinerja merka lebih maksimal.
4. Terkait keberadaan sekolahn Mts swasta yang mengikuti UNBK mohon Pemkab untuk meberikan berikan sarana berupa pengadaan komputer, adapun siswa yang mengikuti UNBK sebanyak 2.415.

5. Mengingat waktu musim hujan akan segera tiba, dan banyaknya pengelola tambang, baik batu kalsit, batu andesit dan Trass atau yang lainnya, kami mohon kepada sdr. Bupati, agar mnginstruksikan pada OPD terkait, untuk melakukan tindakan antisipasi terhadap terjadinya bencana , baik banjir ataupun tanah longsor.

Demikian Pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, untuk selanjutnya mohon tanggapan sdr. Bupati , tentang beberapa catatan kami tersebut di atas.

Trima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya...

Wal'ahul Muwaffiq Ila aqwamitthoriq.....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 14 Nopember 2018

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA


SUGIHARTO

SEKRETARIS


ZAIMUL UMAM NS

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
RAPERDA
TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Rembang, 14 NOVEMBER 2018
Dibacakan oleh : IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
RAPERDA
TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

RABU, 14 NOVEMBER 2018

Dibacakan oleh : IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staff
7. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian pandangan umum ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmatNya kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi atas Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Dalam kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan kami anjurkan sebagai bahan masukan demi kebaikan Rembang kedepan, antara lain :

1. Dalam hal penganggaran belanja yang berkaitan dengan pegawai baik ASN atau yang lain mohon untuk dianggarkan full 12 sampai 14 bulan agar tidak membebani anggaran perubahan yang belum pasti ada dananya.
2. Setelah dihibahkannya tanah untuk undip kami meminta untuk dikawal terus untuk proses pembangunannya, jangan sampai mangkrak lama tidak dibangun-bangun.
3. Tentang pembangunan dan pemindahan pasar Kota Rembang, Kami berharap Pemkab mengkaji ulang apakah akan dipindah dilokasi baru atau cukup dibangun ditempat yang lama sesuai permintaan pedagang.
4. Terkait dengan E-warung kami mengingatkan kepada Pemkab untuk selalu berkoordinasi dengan desa karena banyak yang terjadi nama warung sudah dari Pemkab, Desa tahunya disaat ada survey dari pihak bank.
5. Dengan kenaikan PAD sebesar 0,43% masih jauh dari harapan kita semua, maka kami berharap Pemerintah Kabupaten Rembang membuat prioritas utama yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,
Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 14 November 2018

FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS




EKA SISWA KARTIKA **IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.**



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pemandangan Umum

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
ATAS.**

RAPERDA APBD TA. 2019

Disampaikan oleh : **Drs. H. SUBAWOTO**
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang
Rabu , 14 Nopember 2018

Assalamu 'alaikum wb. wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Yang kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati para pimpinan kesatuan TNI-POLRI, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami hormati Para Pejabat di lingkungan Pemkab Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum FPKB ini, terlebih Dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kab. Rembang *Atas Raperda APBD TA. 2019* dalam Keadaan Sehat Wal afiat tanpa suatu halangan apapun. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT. Amiin

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

Selanjutnya FPKB mengucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Tentu kami, **FPKB** menyetujui apabila Raperda ini segera di bahas melalui mekanisme rapat-rapat berikutnya di DPRD sehingga nanti APBD 2019 sebagai pedoman pemkab dalam menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat bisa ditetapkan pada waktu yang seharusnya sebagaimana amanat perundang-undangan.

Hadirin sidang paripurna yang terhormat,

Kami juga memberikan apresiasi atas semangat dan niat baik Pemkab Rembang dalam merancang APBD 2019 dengan tujuan utama sebagaimana disampaikan

oleh Sdr. Bupati yaitu memperkuat sinergitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk pengembangan potensi wilayah, serta pemeruhan layanan pendidikan dan kesehatan guna perwujudan pemerintahan yang amanah. Namun perkenankan kami memberikan catatan-catatan sebagaimana berikut :

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.824.643.132.071,- (*Satu Trilyun Delapan ratus Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh dua Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah*) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 292.232.322.071,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Dua ratus Tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah*) atau sebesar 16.0 persen dari seluruh Pendapatan Daerah. Setelah kami sandingkan dengan APBD TA. 2018, ternyata pada APBD TA. 2018 proyeksi PAD sebesar Rp. 280.604.454.655,- (*dua ratus delapan puluh milyar enam ratus empat juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*) dan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.760.297.103.655,- (*Satu trilyun tujuh ratus enam puluh milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*) atau 15,94 persen dari total Pendapatan daerah. Meski ada kenaikan sebesar 0,06 Hal ini menunjukkan stagnasi prosentasi kontribusi PAD terhadap APBD Kab. Rembang. Untuk itu FPKB mendorong pemerintah agar memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki sehingga target PAD dapat lebih ditingkatkan.

BELANJA DAERAH

Pada belanja tidak langsung untuk belanja pegawai sebesar Rp. 646.395.126.605,- (*enam ratus empat puluh enam milyar tiga ratus sembilan*

puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) bila disandingkan dengan APBD TA. 2018 Pada belanja tidak langsung untuk belanja pegawai sebesar Rp. 668.770.123.000,- (*enam ratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah*) berarti terdapat selisih kurang Rp. 22.374.996.395,- (*dua puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*) atau sebesar 3,3 persen. FPKB merasa perlu mendapatkan penjelasan dari Pemkab atas berkurangnya anggaran untuk belanja pegawai tersebut dan apakah sudah di perhitungkan secara matang mengingat selisih tersebut cukup besar.

LAIN-LAIN

Dalam skala prioritas pembangunan APBD tahun 2019 belum nampak secara menonjol selain revitalisasi pasar kecuali setelah belanja wajib mulai Pendidikan, Kesehatan dan Pelayanan Publik lainnya. Mengapa Pemkab belum begitu nampak inovatif dan agresif dalam pergerakan Pembangunan? Kalau boleh kami membandingkan dengan Kabupaten-kabupaten sebelah, dimana Pembangunan Infrastruktur jalan bahkan pengembangan jalan, memperlebar jalan dan lain sebagainya cukup menjadi pembangunan prioritas. Bagaimana dengan Kabupaten Rembang yang kita cintai ini???? Mereka Rakyat kecil pasti mendambakan hal tersebut bisa terwujud nyata, setidaknya pupuk boleh langka karena efek Kartu Tani, Harga BBM Boleh Naik, Harga Minyak Juga Naik mungkin itu-itu sudah terbiasa bagi Masyarakat kecil. Hal tersebut sama sekali tidak menggoyahkan kehidupan sehari-hari.... Mereka akan tetap bangga ketika mempunyai jalan yang mulus dan lebar.... Memang pelebaran-pelebaran jalan diseluruh pelosok ruas jalan, baik jalan antar Kecamatan, jalan jalur Kabupaten mendapatkan perhatian khusus oleh Pemkab. Hal ini dilandasi

seiringan dengan perkembangan dan laju cepatnya pertambahan jumlah kendaraan baik mobil maupun sepeda motor yang setiap harinya terus bertambah.

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RAPBD Kab. Rembang TA. 2019 tentang Destinasi Wisata, FPKB mengingatkan kembali pada Misi Pemkab Rembang Nomor 3 yaitu Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif. FPKB melihat Pemkab belum serius dalam memperjuangkan misi ini yang tergambarkan dari minimnya anggaran yang disediakan dan belum jelasnya program-program pengembangan sektor kepariwisataan. terkait rencana Relokasi Pembangunan Pasar Kota Rembang, mengingat banyaknya penolakan dari pedagang sebagai pengguna Utama Pasar dan mengingat Pasar kota tersebut mempunyai nilai sejarah dalam Pergerakan ekonomi Masyarakat Rembang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta agar Relokasi Pasar kota di Tunda dulu sampai ada Kajian secara Komprehensif dengan melibatkan semua Stekholder terkait...Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menolak Relokasi Pasar Kota Rembang kecuali apabila Relokasi tersebut Mendapatkan Dukungan dari semua Pihak yang Berkepentingan ...

Hadirin sidang paripurna yang terhormat,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKB, Selanjutnya FPKB menyatakan MENERIMA Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 untuk dibahas lebih lanjut agar diperoleh RAPBD yang lebih bertanggung jawab dan diterima oleh semua pemangku kepentingan serta bermanfaat bagi sebesar-besarnya masyarakat Kabupaten Rembang.

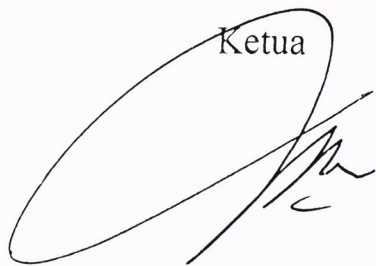
Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya,

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq

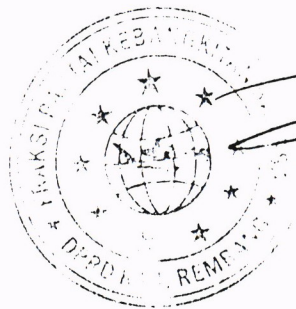
Wassalamualaikum Wr. Wb

Rembang, 14 Nopember 2018

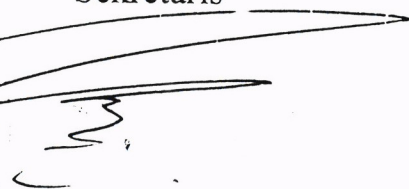
**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Ketua


Muhammad Imron



Sekretaris



Ilyas



FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasional Demokrat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Atas Pengantar Nota Keuangan tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019

Hari / Tanggal : Selasa / 14 November 2018

Dibacakan oleh :

Assalamu' alaikum Wr, Wb .

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!! Salam Restorasi.....

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)

Kab. Rembang

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang

Yang terhormat, Ka Dinas,Badan , Ka Kantor dan Camat se- Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Mulyakan,

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmatNya lah kita pada hari ini dapat menghadiri rapat Paripurna tentang Raperda APBD kabupaten Rembang tahun 2019, Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Sebelum kami menyampaikan Pandangan Kami terhadap Pengantar Nota Keuangan tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, tanggal 10 November kemarin kita bersama-sama memperingati Hari Pahlawan, hari dimana peristiwa sejarah pertempuran Indonesia yang terjadi tanggal 10 November 1945 dimana banyak pahlawan Indonesia yang berjuang mempertaruhkan jiwa, raga serta hartanya untuk kemerdekaan Indonesia. Karena itu sebagai generasi penerus, kita harus mengenang kembali nilai-nilai kepahlawanan yang mulai luntur dan tidak berarti lagi. Dengan mengenang nilai-nilai tersebut maka kita akan kembali membangun sikap kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme sehingga menjadikan teladan saat ini untuk mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan menjaga keutuhan dan kedaulatan Bangsa Indonesia yang harus selalu kita pupuk sedalam-dalamnya. Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan,

Menanggapi Pengantar Nota Keuangan tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan saudara Bupati. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berpendapat :

- Terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana air bersih , perencanaanya harus lebih mengutamakan daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan air bersih (tepat sasaran).
- BPJS yang sudah dicover oleh dana APBD untuk segera dicetak dan diberikan kepada penerima manfaat yang telah terdata.

Terkait korban kecelakaan tunggal yang tidak dicover oleh BPJS atau Jasa Raharja diharapkan ada solusi bagi, karena untuk mendapatkan bantuan dari BPJS atau Jasa Raharja membutuhkan Surat Laporan (Laporan Polisi) dari pihak kepolisian, sedang kepolisian hanya bisa mengeluarkan Surat Keterangan dan itu tidak bisa dipakai untuk pembiayaan di Rumah Sakit.

- Pembangunan infrastruktur jalan, pengembangan jalan, pelebaran jalan dan jembatan diharapkan menjadi prioritas di Kabupaten Rembang. Sehingga terwujudnya adanya jalan tanpa lubang.

- Terkait dengan rencana pembangunan Pasar Rembang, kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mendukung rencana Pemerintah untuk membangun Pasar Rembang dengan catatan Pemerintah Daerah harus mengkaji secara komperhensif dampak-dampak yang timbul dari pembangunan tersebut. Kami sependapat dengan pedagang pasar Rembang, dimana Pasar dibangun tanpa direlokasikan, karena kami khawatir relokasi pasar akan berdampak terhadap pendapatan pedagang tradisional.

Demikian pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, Walaupun singkat semoga bermanfaat. Aamiin...

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....Salam Restorasi.

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua

asmani

Sekretaris

Ali Ircham, ST

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

ATAS

**RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019**



REMBANG, 14 NOVEMBER 2018

Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019

Disampaikan oleh H. Yudianto, SH.
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 14 November 2018

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya.....

Kepada Sdr. Pimpinan DPRD dan Segenap Anggota DPRD Rembang yang kami Hormati dan kami Mulyakan

Kepada Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang kami Hormati dan kami Mulyakan

Kepada Sdr. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang yang kami Hormati dan kami Mulyakan

Yang kami hormati dan Kami mulyakan Sdr. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali kalimat pembuka, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan siang hari yang baik ini, kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna Pertama dalam rangka Pembahasan RAPBD Kabupaten Rembang dalam keadaan baik dan lancar, semoga apa yang telah kita kerjakan ini menjadikan amal dan ibadah yang bermanfaat.

Selanjutnya sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rosullullah Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi umat manusia, dan semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amiin..Amiin ya Robbal Alamiin

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang kami hormati dan kami muliyakan,

Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Rembang mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2018, pahlawan masa Kini adalah Mereka yang tak kenal lelah mengabdikan kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November 2018, dengan Peringatan hari Kesehatan ini dapat menjadikan momentum untuk menggalakkan gerakan masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), marilah kita memulai gaya hidup sehat yang dimulai dari diri kita sendiri.

Sehubungan dengan pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019 dengan tema Pemberdayaan dan Pengembangan SDM menuju Masyarakat yang berdaya saing, inovatif dan kreatif dengan fokus pembangunan pada 7 prioritas yaitu :

1. Peningkatan kualitas pelayanan Masyarakat
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sampai saat ini masyarakat di Kabupaten Rembang yang sudah terdaftar dalam Program BPJS sudah mencapai 85 %. Sisanya sebanyak 15 % belum terdaftar dalam Program tersebut, hal ini menjadi Problem bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat di Kabupaten Rembang. Bagaimana Langkah Bupati untuk memenuhi Program tersebut?

3. Penurunan Angka Kemiskinan

Kita masih prihatin angka kemiskinan di Kabupaten Rembang masih sangat tinggi. Berdasarkan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2017 angka Kemiskinan belum mencapai target yaitu 16,11 %, sementara Realisasinya hanya 18,19 %.

Berkaitan dengan program-program pengentasan kemiskinan sangatlah banyak, mulai dari adanya program KIS/BPJS, KIP, RTH, RTLH dan program-program lain yang langsung menyentuh pada Rumah Tangga Miskin, tetapi pada kenyataannya, aplikasi program tersebut banyak yang tidak tepat sasaran, karena datanya tidak di perbarui/ tidak di update setiap tahun sehingga menimbulkan berbagai masalah. Karena tingkat kesejahteraan Rumah tangga itu bisa berubah-ubah seiring perjalannya

waktu. Ada masyarakat sudah dulu kaya, tapi sekarang jatuh miskin atau sebaliknya. Ada rumah tangga yang saat ini kaya, tapi mendapat BPJS, KIS, RTH, RTLH dari pemerintah, begitu pula sebaliknya. Fenomena ini haruslah dikaji dan diperhatikan oleh Pemerintah.

Bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh Saudara Bupati terkait hal tersebut?

4. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
5. Perluasan Kesempatan Kerja
6. Kualitas Infrastruktur

Kondisi infrastruktur di Kabupaten Rembang masih perlu penanganan yang serius, masih banyak jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten kondisinya masih rusak. Untuk pemeliharaan jalan di Kabupaten Rembang diperlukan strategi penanganan yang benar-benar tepat agar jalan yang rusak sedikit bisa segera diperbaiki tanpa menunggu rusak berat, agar supaya jalan mulus tanpa lubang.

7. Perwujudan *Good Governance*

Fraksi Gerindra meminta agar Bupati tahun Depan merialisasikan opini Laporan keuangan BPK berupa WTP yang merupakan realisasi terwujudnya *Good Governance*.

Selain itu kami juga mengkritisi Rencana Pembangunan Pasar Kota Rembang yang pelaksanaannya akan dipindahkan dilokasi lain yaitu di Pasar Hewan Grajen, kami fraksi Gerindra berdasarkan atas pertimbangan dan aspirasi dari Komunitas Pedagang Pasar Rembang menyatakan Setuju apabila Pembangunan Pasar Rembang tidak dipindahkan di tempat lain.

Terkait dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa, kami berharap realisasinya sesuai dengan regulasi yang sudah ada yaitu Peraturan Bupati yaitu sebesar 12,5 %, karena di Tahun 2018 ternyata dana bagi hasil tersebut yang menjadi Hak Desa tidak bisa terpenuhi semua sesuai dengan amanat peraturan Bupati tersebut dan hal ini sangat mengganggu optimalisasi kinerja Pemerintahan Desa.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang kami hormati dan kami mulyakan,

Demikian Pemandangan Umum ini kami sampaikan. Teriring doa dan semangat kerakyatan semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh tanggung jawab, cermat, hikmah, dan tepat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun niat baik ini serta dapat membuahkan hasil yang optimal, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang. Amiin Ya Robbal alamiin..

Billahitaufiq wal hidaayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

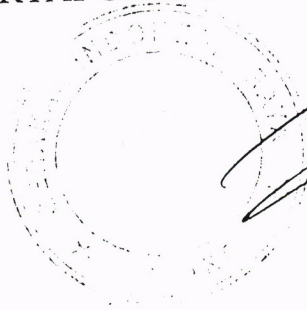
Rembang, 14 Nopember 2018

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG



H. CHASANNUDIN

Wakil Ketua



PUJI SANTOSO. SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 38 Rembang - Telp (0295) 693290



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN
REMBANG**

terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang - Tahun Anggaran 2019

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Hari Rabu, 14 Nopember 2018

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Sdr. Wakil Bupati Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten Sekda dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini, Fraksi Karya Sejahtera mengajak hadirin semua untuk mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT seraya memanjatkan doa agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga apa yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridhoNya.

Mari merenung sejenak memperingati Hari Pahlawan 10 Nopember yang lalu, mengenang para pahlawan yang telah berkorban demi bangsa dan negara.

Saudara Bupati dan para hadirin sekalian.

Pada kesempatan ini Fraksi Karya Sejahtera akan menyampaikan Pemandangan Umum mengenai Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang, sebagai berikut;

- Pada RAPBD TA 2019 ini kami sangat mengapresiasi mengenai kenaikan pendapatan daerah yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen Saudara Bupati beserta jajarannya dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan cukup baik. Semoga hal ini berpengaruh pada optimalisasi jalannya pembangunan dan berdampak positif pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang;
- Fraksi Karya Sejahtera berharap agar setelah Raperda ini nanti disahkan, Saudara Bupati segera untuk mengusulkan rencana pelaksanaannya sebelum akhir tahun 2018 ini. Dengan demikian pelaksanaan APBD untuk tahun 2019 dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, tidak meleset atau tidak tepat waktu seperti pada tahun-tahun sebelumnya;
- Mengenai penyertaan modal kepada PDAM, kami berharap bahwa ini nantinya akan diawasi dengan seksama dan diharapkan dengan adanya penyertaan modal ini, akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan;
- Fraksi Karya Sejahtera menyoroti tentang kemerosotan prestasi di bidang olahraga. Pada PORPROV yang lalu, Kabupaten Rembang hanya menempati posisi kedua dari bawah. Selain itu PSIR sebagai prestise masyarakat Rembang juga mengalami turun kasta di Liga Indonesia. Untuk itu, perlu kiranya pembinaan prestasi di bidang olahraga perlu ditingkatkan;
- Untuk kesekian kalinya kami menghimbau agar jajaran pegawai di lingkungan Pemkab Rembang meningkatkan disiplin dan mengutamakan pelayanan publik. Semua SKPD yang menjalankan fungsi pelayanan publik hendaknya melayani masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, jangan sampai ada alasan pejabat yang berwenang sedang cuti atau sedang pergi.

Kepada SKPD pembina kepegawaian (BKD dan Inspektorat) harus selalu mengawasi kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

- Dalam hal pelaksanaan proyek pembangunan hendaknya diawasi secara seksama, sehingga menghasilkan kualitas pekerjaan yang lebih baik. Menurut pengamatan kami sekarang ini banyak pekerjaan yang berkualitas rendah atau kurang baik.

Sesuai dengan tema kebijakan pembangunan pada tahun 2019 yaitu :
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN SDM MENUJU MASYARAKAT YG BERSAING, INOVATIF DAN KREATIF.

Dan di terjemahkan dalam focus pembangunan serta rencana kegiatan yg akan di laksanakan fraksi Karyasejahtera memberikan catatan sbb ;

1. Penurunan angka kemiskinan

Pada th 2015 jumlah penduduk miskin di kab. Rembang sejumlah 19.50 % sementara pd th 2017 sejumlah 18.35 %. Bahkan pada th 2017 hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sejumlah 0.19 % padahal dalam Perda RPJMD target penurunan angka kemiskinan sejumlah 11.50.%. Artinya setidaknya setiap th ada penurunan angka kemiskinan lebih dari 1.5 %.

Jika mengacu pd data tsb maka penurunan angka kemiskinan kurang dari 1% pertahun.

Sementara kalau mengacu pada kegiatan yang akan di laksanakan dalam RAPBD 2019 belum maksimalnya kegiatan yang bersinergi dalam Rangka penurunan angka kemiskinan yg signifikan.

2. Perluasan kesempatan kerja.

Fraksi Karyasejahtera mengapresiasi atas kerja keras Pemkab untuk menarik investor domestik maupun manca negara khususnya yg bergerak dalam usaha padat karya.

Dari Catatan Fraksi Karyasejahtera investor besar yang akan dan sedang berinvestasi adalah sbb: - PT. SI (Semen Indonesia) sudah

berinvestasi 4.18 T- PT. Seng Dam Jaya Abadi realisasi investasi 41.6 M dr rencana investasi 168.8 M,- PT.Wadah Karya Rembang relisasi investasi 44.56 M darr rencana investasi 451.50 M dll yg total investasi sampai triwulan ke 4 2019 sejumlah 5.9 T~~tr~~

Tetapi Fraksi Karyasejahtera prihatin dengan tingkat kesejahteraan pekerja.karena upah minimum kita kurang dari Rp.1.500.000.Bayangkan kalau pekerja punya satu istri 2 anak apakah mampu bertahan hidup layak dengan UMK sebesar itu, apakah mungkin skema menarik investor dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ?

3. Rencana pembangunan penataan lingkungan permukiman.

Saat ini kawasan kota Rembang belum memiliki saluran air perkotaan besar dan berintegrasi sehingga setiap hujan sedang dan besar menggenangi jalan.ini menyebabkan kerusakan jalan .
Perlu ada perencanaan jaringan saluran integrited.

4. Rencana Pengelolaan TPI terpadu.

TPI merupakan media penggerak perekonomian kawasan pantura dan merupakan sumber pada kita yg besar.

Persoalan kurang teroptimalnya pemungutan retribusi maupun pelanggaran Perda tentang pengelolaan TPI bukan saja di sebabkan oleh lemahnya menegemen TPI tetapi juga kurang tersedianya modal yang cukup yang di miliki pengelola TPI.

Persoalan ini menyebabkan munculnya ^{Pinguaa} ~~pengusaha~~ swasta yg berdampak pada kurang teroptimalnya retribusi yang masuk.

Pemkab harus serius memberikan modal pada pengelola TPI.

5. Rencana Kegiatan Pembangunan Pasar.

Saat ini publik di suguhi sebuah tontonan yg tidak menarik yaitu pro dan kontra rencana pembangunan dan pemindahan pasar kota Rembang ke pasar kambing.

Dalam KUA-PPAS tersedia anggaran 59 m yang pada waktu itu belum di lengkapi dengan kajian komperhensif tentang rencana tsb sebagaimana sering di sampaikan oleh kawan-kawan Anggota DPRD.

Berdasarkan paparan dari konsultan penyusunan ^{dan} ded di ruang rapat paripurna DPRD, rencana anggaran sebesar 59 m hanya mampu utk membangun satu blok dari rencana 4 blok dan hanya mampu menampung pedagang penjual bahan kering. Sementara jenis pedagang yang lain tidak terakomodir. Kemudian Pemkab juga belum mampu mendapatkan lahan pengganti dari pasar kambing di wilayah kota. Fraksi Karya Sejahtera juga belum melihat hasil kajian yang komperhensif.

Atas persoalan tsb di atas Fraksi Karya Sejahtera berpendapat agar ada redesain atas rencana pembangunan pasar kota Rembang dengan di bangun pada tempat di mana pasar itu berada saat ini.

Mengingat luas lahan yang ada seluas 1.5 hektar

Kalau di buat dengan desain yg di Rencanakan Pemkab saat ini dan dengan kesiapan anggaran yg tersedia sejumlah 59 m serta dengan desain tiga lantai (besman, pedagang basah pd lantai 1 dan pedagang kering pada lantai atas), maka akan mampu menampung seluruh pedagang saat ini.

Persoalan kemacetan yang terjadi saat ini sebenarnya bukan pada sempitnya jalan, tetapi tidak adanya penertiban dari aparat Pemkab termasuk limbah pasar saat ini perlu ada perawatan yang rutin dari Pemkab.

Saudara pimpinan sidang dan para hadirin sekalian.

Sebelum mengakhiri pemandangan umum ini perkenankanlah kami mengutip sebuah sesanti sbb: "Ojo kegedhen empyak kurang cagak.". Artinya, jangan sampai banyak pengeluaran tetapi kurang penghasilan. Atau juga bisa diartikan, janganlah punya cita cita yang besar tetapi tidak punya kemampuan yang cukup.

Akhirnya, bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Karya Sejahtera kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan

pengabdian membangun Kabupaten Rembang. Rahayu ingkang samya pinanggih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,

Sekretaris,


H. ISMARI, SH


H. JOKO SUPRIHADI, SH





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI HARAPAN

Sekretariat: DFRD Rembang, Jl. Diponegoro No.88,
Rembang 59212



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG

DISAMPAIKAN DLM RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. REMBANG
HARI RABU, 14 NOVEMBER 2018
DIBACAKAN OLEH:

Yang Terhormat

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Bapak Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansai Vertikal se Kabupaten Rembang,
- Camat se Kabupaten Rembang
- dan semua hadirin yang berbahagia

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi HARAPAN akan menyampaikan mengenai rancangan peraturan daerah, anggaran

pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2019 yang telah disampaikan oleh saudara Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang, sebagai berikut;

- pada RAPBD tahun 2019 ini kami sangat mengapresiasi mengenai kenaikan pendapatan daerah yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen saudara bupati beserta jajarannya dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan cukup baik. Semoga hal ini berpengaruh pada optimalisasi jalanya pembangunan dan dampak positif pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat rembang.
- Fraksi harapan berharap agar setelah raperda ini nanti disahkan, saudara Bupati segera untuk mengusulkan rencana pelaksanaannya sebelum ahir tahun 2018 ini. Dengan demikian pelaksanaan APBD untuk tahun 2019 dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah di buat, tidak meleset atau tidak tepat waktu seperti pada tahun- tahun sebelumnya,
- Mengenai penyertaan modal kepada PDAM, kami berharap bahwa ini nantinya akan diawasi dengan seksama dan di harapkan denganadanya penyertaan modal ini, akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan,
- Fraksi harapan menyoroti tentang kemerosotan prestasi di bidang olahraga. Pada PORPROV yang lalu, kabupaten rembang hanya menempati posisi kedua dari bawah. Selain itu PSIR sebagai *prestise* masyarakat rembang juga mengalami turun kasta di liga indonesia. Untuk itu, perlu kiranya pembinaan prestasi di bidang olahraga perlu ditingkatkan.
- Untuk kesekian kalinya kami menghimbau agar jajaran pegawai di lingkungan Pemkab Rembang meningkatkan disiplin dan mengutamakan pelayanan publik. semua SKPD yang menjalankan fungsi pelayanan publik hendaknya melayani masyarakat sesuai

dengan waktu yang telah di tentukan, jangan sampai ada alasan pejabat yang berwenang sedang cuti atau sedang pergi.

Kepada SKPD pembina kepegawaian(BKD dan inspektorat) harus selalu mengawasi kinerja pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Rembang,

- Dalam hal melaksanakan proyek pembangunan hendaknya di awasi secara seksama, sehingga menghasilkan kualitas pekerjaan yang lebih baik, menurut pengamatan kami sekarang ini banyak pekerjaan yang berkualitas rendah atau kurang baik.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan.

Demikianlah pemandangamag Umum dari Fraksi Harapan, semoga pembahasan ini dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari petunjuk Allah SWT. Amin

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI HARAPAN

Ketua,

Sekretaris,

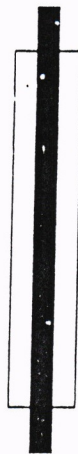
SUKARMAIN

SAHNINGSIH, SE



JAWABAN BUPATI REMBANG

ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS
PENGANTAR NOTA KEUANGAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG



TAHUN ANGGARAN
2019



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat :

- Saudara Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;
- Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Saudara Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali jawaban Saya atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masih diberi nikmat, kesehatan dan kebahagiaan.

Berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan yang disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	I. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
1.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyambut baik dan positif atas kerjasama Pemkab. Rembang dengan PTN Undip Semarang di bidang pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM di Kab. Rembang	1. Terima kasih atas dukungannya
2.	Diharapkan pemkab. Rembang dapat mengoptimalkan BUMDES di masing-masing desa untuk menyalurkan Rastra yang berfungsi sebagai pelayanan E-Warung selama tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku	2. Bantuan pangan yang diberikan pemerintah dapat dicairkan/ditukarkan dengan bahan pangan yang telah ditentukan di E-warung (Elektronik Warung Gotong Royong). E-warung adalah agen bank, atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pencairan/penukaran /pembelian bahan pangan oleh KPM yaitu pasar tradisional, warung,toko kelontong,E-Warung KUBE, warung desa, rumah pangan kita(RPK), agen bank yang menjual bahan pangan atau usaha eceran lainnya. BUMDES tidak boleh menjadi agen E-warung, hanya boleh menjadi pemasok sembako berupa beras dan telur sesuai surat Dirjen PFMKemensos, No.06/4/PER/HK.01/08/2018
3.	Mengusulkan adanya Tambahan Penghasilan bagi THL khususnya THL di TPI/PPI	3. Pada prinsipnya kami sependapat untuk menaikkan honor THL karyawan TPI yang disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019.
④.	Dimohon memberikan sarana pengadaan komputer bagi sekolah MTs swasta dalam pelaksanaan UNBK	4. Terima kasih akan kami perhatikan
5.	Untuk mengantisipasi datangnya musim penghujan dan banyaknya pengelola tambang, Pemkab. Rembang agar menginstruksikan pada OPD terkait untuk melakukan tindakan antisipasi terhadap terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.	5. Pemerintah Kabupaten Rembang selalu mengintruksikan kepada pengelola tambang maupun OPD terkait dalam rangka antisipasi terhadap terjadinya bencana banjir dan tanah longsor pada musim penghujan.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	<u>II. FRAKSI DEMOKRAT</u>	
1.	Belanja Pegawai agar dianggarkan 12 sampai 14 bulan supaya tidak membebani anggaran perubahan	1 Akan kami perhatikan, perlu kami sampaikan bahwa Pemkab telah menganggarkan belanja wajib dan mengikat sesuai ketentuan yang berlaku
2.	Hibah tanah untuk UNDIP agar dikawal pembangunannya supaya tidak mangkrak	2. Kami senantiasa berkoordinasi dengan UNDIP dalam rangka pengelolaan Perguruan Tinggi di Kabupaten Rembang sehingga kesepakatan yang sudah disetujui bersama dapat berjalan sesuai dengan hasil kesepakatan.
3	Pemindahan Pasar Kota Rembang agar dikaji ulang, pindah tempat atau membangun pasar yang larna	3 Kami telah memiliki Dokumen Study kelayakan (Feasibility Study) Pasar Rembang, sebagai salah satu rencana awal untuk pembangunan pasar Rembang, apabila redesain dengan lahan yang ditempati saat ini akan menyita waktu, biaya dan tempat untuk pemindahan tempat berdagang sementara.
4	Pemkab agar berkoordinasi dengan desa terkait E-Warung	4 Lihat jawaban pada Partai Persatuan Pembangunan
5	Pemerintah Kabupaten diharapkan membuat prioritas utama dalam peningkatan PAD	5 Pemerintah Kabupaten Rembang telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan atas potensi yang ada, seperti pendampingan oleh UGM dalam rangka menggali potensi PAD. kerjasama dengan Bank Jateng dalam rangka e-Retribusi house to house dan Chase Management System (CMS).

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	III. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
1.	Pembkab diharapkan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan menggerakkan seluruh potensi agar target PAD dapat ditingkatkan.	1. Terimakasih, kami terus berupaya untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah serta menggali potensi-potensi pendapatan daerah di Kabupaten Rembang sehingga target kenaikan Pendapatan Daerah dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.
2.	Mohor. penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Rembang atas berkurangnya anggaran belanja pegawai TA 2019 jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2018	2. Berkurangnya anggaran belanja pegawai TA 2018 dengan TA. 2019, dikarenakan adanya pegawai pensiun pada tahun 2018 dan penyesuaian Tunjangan Sertifikasi Guru.
3.	Pembkab diharapkan lebih inovatif dan agresif dalam pergerakan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur jalan	3. Pemerintah Kabupaten Rembang secara terus menerus untuk membangun infrastruktur jalan, guna meningkatkan laju ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang.
4.	Pembkab dianggap belum serius dalam peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif a. Belum jelasnya program-program pengembangan sektor pariwisata b. Rencana relokasi Pasar Kota Rembang agar ditunda dulu sampai ada kajian secara komprehensif	4. a. Sebenarnya pembkab. Rembang telah berupaya dalam rangka meningkatkan investasi dan pengembangan pariwisata melalui peningkatan sarpras dan destinasi wisata melalui usulan bantuan keuangan propinsi Jawa Tengah. b. Lihat jawaban dari Partai Demokrat

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
IV. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN & NASDEM		
1.	Terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana air bersih, perencanaannya harus lebih mengutamakan daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan air bersih (tepat sasaran)	Terima kasih, penyediaan sarana dan prasarana air bersih kami prioritaskan dan terus kami kembangkan untuk perluasan cakupan penyediaan air bersih, sehingga seluruh daerah di Kabupaten Rembang bisa merasakan aliran air bersih.
2.	BPJS yang sudah dicover oleh dana APBD untuk segera dicetak dan diberikan kepada penerima manfaat yang telah terdata.	Terima kasih, peserta BPJS PBI (penerima bantuan iuran), diperuntukkan bagi warga miskin kurang mampu sesuai dengan kriteria dari dinas sosial, untuk peserta BPJS PBI ini sudah dicover APBD Kab. Rembang, dan kami beserta kantor BPJS Perwakilan Rembang berupaya untuk segera mencetak dan mendistribusikan kartu dimaksud kepada penerima.
3.	Pembangunan infrastruktur jalan, pengembangan jalan, pelebaran jalan dan jembatan diharapkan menjadi prioritas di Kabupaten Rembang. Sehingga terwujudnya adanya jalan tanpa lubang.	Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan terus memacu pembangunan infrastruktur jalan, pengembangan jalan, pelebaran jalan dan jembatan hal ini penting dilaksanakan guna memenuhi konektivitas antar wilayah di Kabupaten Rembang sehingga tingkat perekonomian masyarakat meningkat, terkait dengan jalan berlubang kami secara intens melakukan pemeliharaan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Rembang.
4.	Terkait dengan rencana pembangunan Pasar Rembang Pemerintah Daerah harus mengkaji secara komprehensif dampak-dampak yang timbul dari pembangunan tersebut.	Dalam rangka pembangunan Pasar kota Rembang Pemerintah Kabupaten telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan tahapan yang ada mulai dari penyusunan kajian oleh UNDIP, penyusunan DED maupun melakukan pendekatan langsung kepada pedagang-pedagang terhadap rencana pembangunan tersebut.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
<u>V. FRAKSI GERINDRA</u>		
1.	Langkah Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap warga masyarakat yang belum terdaftar dalam Program BPJS	<p>1. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses kesehatan ke keluarga dengan program PIS PK - Peningkatan mutu kualitas FKTP dengan program akreditasi puskesmas - Peningkatan mutu kualitas SDM kesehatan, sarana dan prasarana penunjang kesehatan
2.	Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan	<p>2. Pem Kab Rembang telah secara aktif mendorong peningkatan investasi pada industri-industri padat karya, telah melaksanakan program-program untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin diantaranya melalui jaminan pelayanan kesehatan dan pendidikan, penanganan PMKS, penanganan Rumah Tidak Layak Huni, pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kerakyatan menuju kemandirian ekonomi yang berkesinambungan.</p>
3	Perbaikan infrastruktur jalan kabupaten yang masih rusak	<p>3. upaya perbaikan berbagai ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Rembang telah dilakukan di tahun 2018, apabila masih ada kerusakan jalan akan dilakukan di tahun 2019</p>
4	Opini Laporan keuangan BPK berupa WTP agar segera terealisasi	<p>4. Rekomendasi yang menyebabkan Pemkab Rembang belum mendapat opini WTP sudah kami lakukan penyelesaiannya secara bertahap baik dengan cara memobilisasi ASN maupun melakukan pendampingan dengan pihak ketiga, dengan harapan di tahun 2019 Pemkab sudah mendapat Opini WTP dari BPK.</p>

No	PERTANYAAN	JAWABAN
5.	Pembangunan Pasar Rembang agar tidak dipindahkan	5 Lihat jawaban yang sudah ada
6	Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa agar realisasinya sesuai dengan Peraturan Bupati.	6 Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sudah direalisasi sesuai Permendagri 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2019 Romawi III Kebijakan Penyusunan APBD angka 2) Belanja Daerah huruf c bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, dan sudah sesuai Peraturan Bupati

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	VI.FRAKSI KARYA SEJAHTERA	
1.	Belum maksimalnya kegiatan yang bersinergi dalam rangka penurunan angka kemiskinan dalam RAPBD 2019.	1. Lihat jawaban yang sudah ada pada Fraksi Demokrat.
2.	Keprihatinan Fraksi Karya Sejahtera terhadap kesejahteraan pekerja di Kab Rembang karena upah minimum di Kab. Rembang kurang dari Rp. 1.500.000,00 apakah mampu bertahan hidup layak dengan UMK sebesar itu.	2. Upah Minimum Kabupaten Rembang Tahun 2018 tidak dibawah Rp. 1.500.000,00 melainkan Rp. 1.535.000,00 sudah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Untuk Tahun 2019 Upah Minimum Kab Rembang kita usulkan kepada Gubernur sebesar Rp. 1.660.000,00 sesuai dengan tata cara perhitungan yang diamanatkan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015.
3.	Saat ini Rembang belum memiliki saluran air perkotaan besar dan berintegrasi sehingga hujan akan menggenangi jalan yang mengakibatkan kerusakan jalan.	3. Kami sepakat dengan adanya kebutuhan perencanaan jaringan saluran intregated. Adapun langkah-langkah yang kami tempuh meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan masterplant drainase Kota Rembang dan Lasem serta jaringan drainase kabupaten. • DED drainase dan bangunan pelengkap jalan. • Masterplant bangunan pelengkap jalan Kabupaten Rembang meliputi trotoar, talud jalan, marka jalan, lampu penerangan jalan, median jalan.
4.	Persoalan kurang optimalnya pemungutan retribusi maupun pelanggaran Perda tentang pengelolaan TPI.	4. Saat ini Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus berupaya membenahi manajemen pengelolaan TPI melalui penyempurnaan regulasi dan penerbitan dalam proses pelelangan ikan di TPI.

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
		Terkait dengan TPI untuk memperlancar pembayaran hasil lelang ikan kepada nelayan akan dikaji sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
5.	Atas persoalan rencana kegiatan pembangunan pasar perlu ada redesain dengan dibangun pada tempat dimana pasar saat ini berada agar mampu menampung seluruh pedagang saat ini.	5. Lihat jawaban yang sudah ada pada Fraksi Demokrat.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	VII. FRAKSI HARAPAN	
1.	Kami sangat mengapresiasi mengenai kenaikan Pendapatan Daerah yang cukup signifikan.	Terimakasih, kami terus berupaya untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah serta menggali potensi-potensi pendapatan daerah di Kabupaten Rembang sehingga target kenaikan Pendapatan Daerah dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.
2.	Pelaksanaan APBD untuk tahun 2019 dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.	Terimakasih atas prakarsanya, kami telah menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD beserta jajarannya agar pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan rencana yang tercantum dalam DPA SKPD.
3.	Penyertaan modal PDAM nantinya akan diawasi dengan seksama dan atas penyertaan modal tersebut akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan.	Pemerintah Kabupaten Rembang telah memiliki Badan Pengawas BUMD yang tugasnya mengawasi pelaksanaan atas pemberian penyertaan modal dimaksud, tugas penting yang diemban oleh PDAM adalah menyediakan air bersih yang dapat dikonsumsi serta menjaga ketersediaan debit air bersih bagi masyarakat serta meningkatkan mutu layanannya.
4.	Kemerosotan prestasi dibidang olah raga, perlu adanya pembinaan.	Kami akan melakukan terobosan guna peningkatan prestasi olah raga di Kabupaten Rembang melalui penggiatan dan pelaksanaan lomba-lomba olah raga secara dini yang dimulai dari murid SD, SLTP, SLTA sehingga bibit-bibit atlet yang berkualitas muncul, serta kami akan mengoptimalkan sarana prasarana olah raga yang telah tersedia.
5.	Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang agar meningkatkan disiplin dan mengutamakan pelayanan publik.	Terima kasih akan kami perhatikan.
6.	Banyak pekerjaan yang berkualitas rendah atau kurang baik karena kurangnya pengawasan.	Terima kasih akan kami perhatikan.

Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya hormati,


Demikian jawaban atas pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis, kami memnepsilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan komisi-komisi.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 14 Nopember 2018

BUPATI REMBANG


H. ABDUL HAFIDZ



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (II)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2019**

Hari : Jum' at
Tanggal : 30 November 2018
Waktu : 13.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Persetujuan Propemperda Kabupaten Rembang Tahun 2019;
 3. Laporan Banggar atas hasil pembahasan Raperda APBD Tahun 2019;
 4. Penyampaian Pendapat fraksi terhadap hasil pembahasan Raperda APBD Tahun 2019;
 5. Persetujuan Penetapan Raperda APBD Tahun 2019;
 6. Penandatanganan persetujuan bersama dan penyerahan keputusan DPRD;
 7. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati terhadap pembahasan Raperda APBD Tahun 2019;
 8. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : 7 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 6 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 8 orang |
| 5. Fraksi Gerindra | : 5 orang |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : 4 orang |
| 7. Fraksi Harapan | : 4 orang |
| Jumlah | <hr/> : 44 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : 7 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 6 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 6 orang |
| 5. Fraksi Gerindra | : 3 orang |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : 4 orang |
| 7. Fraksi Harapan | : 4 orang |
| Jumlah | <hr/> : 40 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : - orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : - orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : - orang |

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 4 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita, baik kesehatan jasmani maupun rokhani sehingga kita berkesempatan mengikuti Rapat Paripurna

Kedua DPRD dalam rangka Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Peserta rapat dan hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana ketentuan yang berlaku pada rapat paripurna pertama dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 14 November 2018, bahwa keabsahan rapat paripurna kedua ini berdasarkan Pasal 107 Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Adapun sesuai catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 44 orang. Dengan demikian kuorum rapat paripurna ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucapkan “**Bismillahirrohmanirrohim**” tepat pukul 14.35 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang pada tanggal 13 November 2018, terdapat beberapa

agenda dalam rapat paripurna ini, dan untuk selengkapnya akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna ini adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan.
2. Persetujuan Program Pembentukan Perda Kabupaten Rembang Tahun 2019;
3. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
4. Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
5. Persetujuan Penetapan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 dilanjutkan penandatanganan persetujuan bersama dan penyerahan Keputusan DPRD;
6. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
7. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita ikuti acara kedua, yaitu Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019.

Pada Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan :

- ayat (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda

- ayat (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- ayat (3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- ayat (4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang telah menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2019 kepada DPRD, melalui Surat Bupati Rembang Nomor : 188.3/2684/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Pengiriman Propemperda Kabupaten Rembang Tahun 2019. Selanjutnya oleh DPRD Kabupaten Rembang dengan memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, melalui Badan Pembentukan Perda pada tanggal 24 November 2018 telah dilakukan koordinasi bersama Tim Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyusun Program Pembentukan Perda Kabupaten Rembang Tahun 2019, yang hasilnya sebagaimana fotocopy Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Program Pembentukan Perda Kabupaten Rembang Tahun 2019, yang berada di tangan Saudara-saudara anggota.

Adapun untuk keabsahannya, perlu persetujuan terlebih dahulu dari rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

“ Apakah Rancangan Program Pembentukan Perda Kabupaten Rembang Tahun 2019 dapat disetujui dan disahkan menjadi Program Pembentukan Perda Kabupaten Rembang Tahun 2019 ?”

===== SETUJUUUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita masuki acara ketiga, yaitu Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Untuk penyampaianya, saya minta kepada Saudara Drs. Drupodo, M.Si. bersedia membacakannya.

===== LAPORAN BADAN ANGGARAN =====

➤ *(Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 terlampir)*

Terima kasih Saudara Drs. Drupodo, M.Si. atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara keempat yaitu Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Kepada yang ditunjuk untuk menyampaikan Pendapat Fraksi, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Muh. Zaenuri
2. Fraksi Demokrat : Sdr. Eka Siswa Kartika
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Ilyas
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdr. Sustiyono
5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : Sdr. H. Chasanuddin
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. Ali Imren Wahyudi
7. Fraksi Harapan : Sdr. Sukarmain

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, disilahkan.

Nama Fraksi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	✓		
Fraksi Demokrat	✓		
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	✓		
Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	✓		
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	✓		
Fraksi Karya Sejahtera	✓		
Fraksi Harapan	✓		

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Kita masuk acara berikutnya, yaitu Persetujuan Penetapan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, dilanjutkan penandatanganan persetujuan bersama dan penyerahan Keputusan DPRD.

Sehubungan moment ini sangat menentukan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Rembang satu tahun ke depan, saya minta kepada seluruh anggota DPRD untuk lebih fokus dalam memberikan persetujuan.

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

“Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD melalui Laporrannya dapat disetujui ?”

===== SETUJUUUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Terimakasih kepada rekan-rekan anggota yang telah memberikan persetujuan terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Atas persetujuan dari anggota ini, selanjutnya akan dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, diteruskan dengan penyerahan Surat Keputusan DPRD kepada Kepala Daerah.

Agar prosesi penandatanganan dan penyerahan Surat Keputusan berjalan lancar, saya minta kepada Sekretariat DPRD untuk memandu jalannya prosesi.

Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Sekretariat DPRD.

Disilahkan.

===PENANDATANGAN PERSETUJUAN BERSAMA===

Terimakasih kepada Sekretariat DPRD atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara terakhir, yaitu Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Kepada saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

====PENDAPAT AKHIR BUPATI ====

➤ *(Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 terlampir)*

Terima kasih saudara Bupati, atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Acara demi acara telah kita ikuti, maka selesai sudah acara rapat paripurna hari ini. Terima kasih kepada Saudara Bupati beserta jajarannya, rekan-rekan Anggota, Sekretaris DPRD beserta seluruh staf yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sehingga pembahasan Raperda tentang APBD ini dapat berjalan lancar sesuai dengan waktu yang telah dijadualkan. Kepada saudara-saudara yang telah mengikuti Rapat, kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna pada hari ini.

Selanjutnya dengan mengucap “ *Alhamdulillah* robbil ‘*alamin* “ tepat pukul 16.05 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K E T U A,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS, ✓



Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

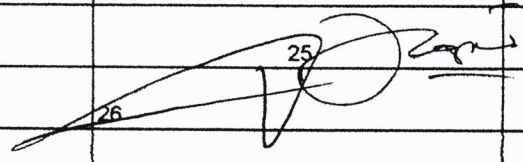
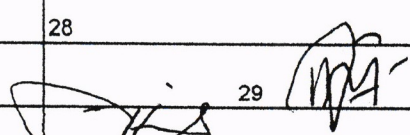

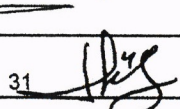
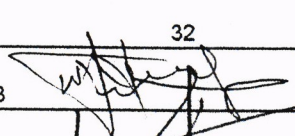

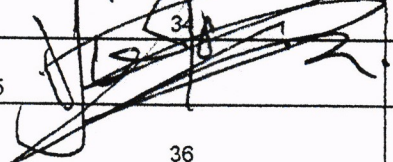
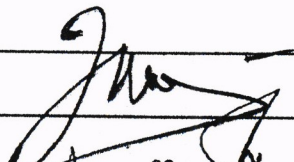
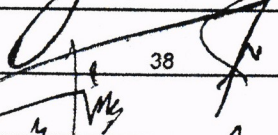
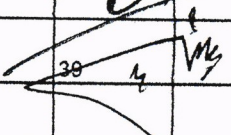
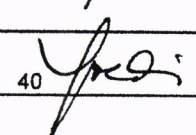
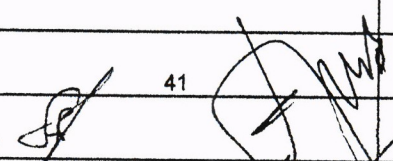
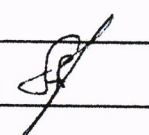
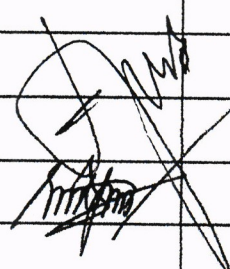
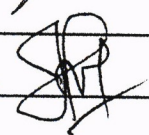
**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
APBD TAHUN ANGGARAN 2019**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , OPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2019;
- LAMPIRAN III : Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan
Raperda APBD Tahun Anggaran 2019;
- LAMPIRAN IV : Pendapat Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun
Anggaran 2019;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Nomor ...17..... Tahun 2018
Tentang Persetujuan Penetapan Raperda APBD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
- LAMPIRAN VI : Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan
Raperda APBD Tahun Anggaran 2019;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

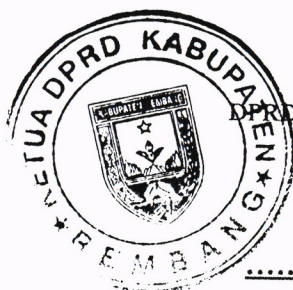
HARI/TANGGAL : JUM'AT, 30 NOVEMBER 2018
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	✓
12	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	12	
13	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	13	
14	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	14	
15	H. ISLAHUDDIN	Anggota	15	
16	H. HARNO, S.E.	Anggota	16	
17	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	17	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
18	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	18	✓
19	MOHAMMAD IMRON	Anggota	19	
20	ILYAS	Anggota	20	
21	SHOLEH, B.A	Anggota	21	
22	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	22	
23	Drs H MUH SUBAWOTO	Anggota	23	

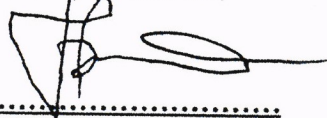
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
24	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	24 ✓
25	JASMANI	Anggota	25 
26	WIDODO	Anggota	26
27	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	27
28	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29 
30	FRIDA IRIANI	Anggota	30 
31	SUSTIYONO	Anggota	31 
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
32	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	32
33	H. CHASANUDDIN	Anggota	33 
34	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	34 
35	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	35
36	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	36 
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
37	H. ISMARI, S.H.	Anggota	37 
38	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	38 
39	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	39 
40	ALI IMRON WAHYUDI	Anggota	40 
FRAKSI HARAPAN			
41	SUKARMAIN	Anggota	41 
42	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	42 
43	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	43 
44	NUR JANNAH	Anggota	44 

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



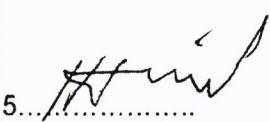


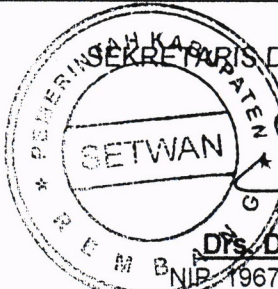
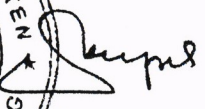
DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 30 NOVEMBER 2018
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5	<i>Wardiyana</i>	Dandim 0720 Rembang	5. 
6	Kepolisian Resort Rembang	6.
7	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8.

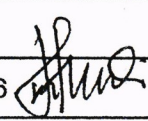

 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 SETWAN

 Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 30 NOVEMBER 2018
PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI	Hari		4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	Non effudi	As 3	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Kurunt	Humas.	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Agus wan H	kebang	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Latipudin	Kes	13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			14
15	BAG. UMUM			15
16	BPPKAD	MUSTOti	Kab	16
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA	Desi Rahyuni	Bappeda	18
19	DINSOSP2KB	NGATINI	seket	19
20	B K D			20
21	B P B D			21
22	DPU TATA RUANG			22
23	DINPERKIM	Joessiennarni	Kadi	23
24	DINAS KESEHATAN	Supriyo Utomo	seket	24
25	DINDIKPORA	Mardi	Kasim	25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM			26
27	DINTANPAN	Suratni		27
28	DINLUTKAN	Suparman		28
29	DINKOMINFO			29
30	DINAS PERHUBUNGAN	Trih. Damanis	Vadin	30

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL	Moh. Daenuri	Kadis	31
32	DINPERMADES	Sulistaw		32
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	KARSONO	Sekretaris	33
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sarloni	Kabid	34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS			35
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	SISWADI	KASIS AKUISISI	36
37	DINAS PMPTSP NAKER			37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO			38
39	SATPOL PP	H. WALUYO	Kasat Pol	39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KPII KAB. REMBANG			64

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
66	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			66
67	BTPN KCP. REMBANG			67
68	PERUM PEGADAIAN			68
69	BSM.BANK DANAMON			69
70	DHARMA WANITA PERSATUAN			70
71	GERAKAN PRAMUKA			71
72	PMI CAB. REMBANG			72
73	STIE. YPPI REMBANG			73
74	DPC PPP			74
75	DPC PARTAI DEMOKRAT			75
76	DPD PARTAI GOLKAR			76
77	DPD PAN			77
78	DPC PARTAI HANURA			78
79	DPC PKS			79
80	DPC PARTAI NASDEM			80
81	DPC PARTAI GERINDRA			81
82	DPC PKB			82
83	DPC PDI PERJUANGAN			83
84	SUARA MERDEKA			84
85	CAKRA TV			85
86	RADIO CBFM	Masudi	Reporter	86 
87	RADIO R2B			87
88	MAJALAH BANGKIT			88
89	PATI EKSPRESS			89
90	RADIO MATA AIR			90

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
91	FA FICE	Agus		91
92	Ridu Kudi	off sapu		92
93	Asmii	CBPM		93
94	Dul Muli	Ditangan		94
95	fan h	Permodalan		95
96	PAKIK	Peraturan		96
97	Hagus	liver as		97
98	Kodim	Agus		98
99	TA Kudu Bema	Kudi		99
100	Wardiyana Kodim	Wardiyana	PKRTER	100



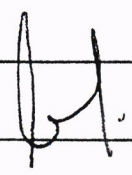


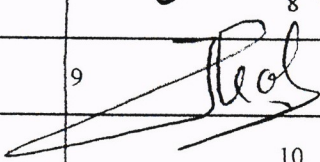
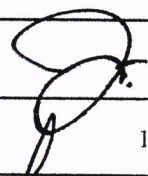
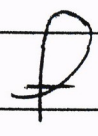

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

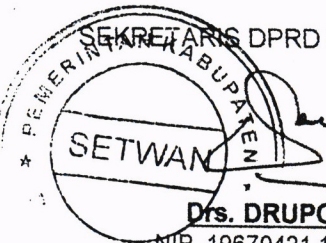
SETWAN

Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 196704211993031009

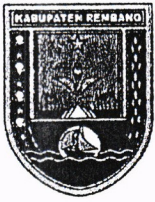
**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019**

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 30 NOVEMBER 2018
PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	1
2	CAMAT KALIORI	2
3	CAMAT SUMBER	Kandari	3 
4	CAMAT SULANG	4
5	CAMAT BULU	Tebuh M	5 
6	CAMAT PAMOTAN	Sri Mulyani	6 
7	CAMAT GUNEM	Suharno	7 
8	CAMAT SALE	Rubhan	8 
9	CAMAT LASEM	TASMIEN	9 
10	CAMAT PANCUR	10
11	CAMAT SEDAN	Rubhan	11 
12	CAMAT SLUKE	Hidayat	12 
13	CAMAT KRAGAN	M. ang	13 
14	CAMAT SARANG	14



 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 SETWAN
 Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang 59212 Telepon (0295) 691194

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa untuk menetapkan Nota Persetujuan Antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Raperda Tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, perlu diadakan pembahasan oleh DPRD Kabupaten Rembang;
2. Bahwa hasil pembahasan Raperda Tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
11. Surat Bupati Rembang Nomor 188.3/1863/2018 tanggal 27 Oktober 2018 perihal Pengiriman Raperda;
12. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang bersama TAPD Kabupaten Rembang tanggal 13 Nopember 2018 yang membahas penetapan jadwal pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

III. PELAKSANAAN

- a. Rapat Paripurna I di ruang Rapat Paripurna pada tanggal 14 Nopember 2018 jam 12.12 WIB dengan agenda Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2019.
- b. Rapat Paripurna lanjutan pada tanggal 14 Nopember 2018 jam 13.12 WIB dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dan dilanjutkan pada jam 15.00 WIB dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.
- c. Rapat Badan Anggaran dan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada tanggal 19 Nopember 2018 Jam 09.00 WIB di ruang Banggar dengan acara Penjelasan lanjutan atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019.
- d. Rapat Pimpinan dan Anggota Banggar serta Pimpinan Komisi dengan Tenaga Ahli pada tanggal 21 Nopember 2018 jam 09.00 WIB di ruang Banggar dengan agenda Telaah Tim Ahli DPRD Kabupaten Rembang terhadap Kajian Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.
- e. Berdasarkan Hasil Kesepakatan Rapat Banggar pada tanggal 19 Nopember 2018, Banggar mendelegasikan kepada komisi untuk melakukan pembahasan Raperda bersama OPD terkait. Sehubungan dengan hal tersebut maka telah diadakan Rapat Komisi A, B, C, dan D dengan OPD terkait pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018 jam 09.00 WIB sampai selesai dengan agenda membahas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

- f. Rapat Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran pada tanggal 24 Nopember 2018, bertempat di ruang Banggar jam 09.00 WIB dengan agenda Penyampaian laporan komisi kepada Banggar atas pedalaman Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019.
- g. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD tanggal 29 Nopember 2018, bertempat di ruang Banggar jam 09.00 WIB dengan agenda Sinkronisasi dan koordinasi pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.
- h. Rapat Fraksi-fraksi bertempat ruang Banggar tanggal 29 Nopember 2018 Jam 12.00 WIB dengan acara Penyusunan pendapatan fraksi atas hasil pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, dengan hasil sebagai berikut:

IV. HASIL PEMBAHASAN
RINGKASAN RANCANGAN APBD INDUK 2019

NO	SKPD	PEMBAHASAN		
		RANCANGAN APBD 2019	PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4-3
1	PENDAPATAN DAERAH	1,824,643,132,071	1,511,663,496,071	(312,979,636,000)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	292,232,323,071	291,855,438,071	(376,885,000)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	96,850,500,000	96,850,500,000	-
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23,158,499,000	23,158,499,000	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,030,000,000	10,030,000,000	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	162,193,324,071	161,816,439,071	(376,885,000)
1.2	Dana Perimbangan	996,263,048,000	842,646,897,000	(153,616,151,000)
1.2.2	Dana Transfer Umum	818,494,977,000	842,646,897,000	24,151,920,000
1.2.3	Dana Transfer Khusus	177,768,071,000	-	(177,768,071,000)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	536,147,761,000	377,161,161,000	(158,986,600,000)
1.3.1	Pendapatan Hibah	58,432,800,000	58,432,800,000	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	90,000,000,000	90,000,000,000	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	228,728,361,000	228,728,361,000	-
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	158,986,600,000	-	(158,986,600,000)
2.	BELANJA DAERAH	1,867,195,680,914	1,554,032,340,914	(313,163,340,000)
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,064,374,452,205	957,396,729,205	(106,977,723,000)
2.1.1	Belanja Pegawai	646,395,126,605	557,789,003,605	(88,606,123,000)
2.1.2	Belanja Bunga	1,131,632,000	1,131,632,000	-
2.1.4	Belanja Hibah	46,944,600,000	29,013,000,000	(17,931,600,000)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4,912,160,000	4,887,160,000	(25,000,000)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11,944,474,900	11,944,474,900	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	352,046,458,700	351,631,458,700	(415,000,000)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000	1,000,000,000	-
2.2	Belanja Langsung	802,821,228,709	596,635,611,709	(206,185,617,000)
2.2.1	Belanja Pegawai	162,577,010,350	175,391,377,050	12,814,366,700
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	292,441,588,984	276,970,168,184	(15,471,420,800)
2.2.3	Belanja Modal	347,802,629,375	144,274,066,475	(203,528,562,900)
	Jumlah Belanja	1,867,195,680,914	1,554,032,340,914	(313,163,340,000)
	surplus (devisit)	(42,552,548,843)	(42,368,844,843)	183,704,000
				-
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	49,420,916,843	49,237,212,843	(183,704,000)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	49,420,916,843	49,237,212,843	(183,704,000)
				-
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	49,420,916,843	49,237,212,843	(183,704,000)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	6,868,368,000	6,868,368,000	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000,000	3,000,000,000	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3,868,368,000	3,868,368,000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6,868,368,000	6,868,368,000	-
	Pembiayaan Netto	42,552,548,843	42,368,844,843	(183,704,000)
				-
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	-	-

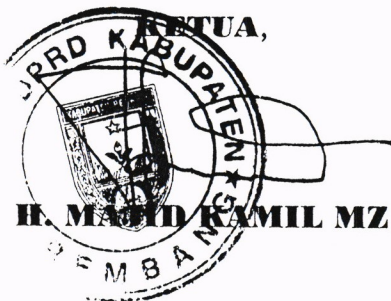
V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Nota Persetujuan antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 30 Nopember 2018

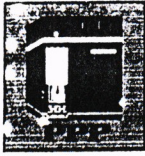
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

BADAN ANGGARAN



Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

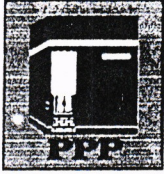
RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG



TAHUN ANGGARAN 2019

Jum'at , 30 Nopember 2018

Dibacakan oleh : ZAIMUL UMAM NS



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Jum'at , 30 Nopember 2018

Dibacakan oleh : ZAIMUL UMAM NS

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat siang , dan Salam sejahtera bagi kita semua

Bismillah., Alhamdulillah., Assholatu Wassalamu a'la Rosulilla., Wa'alaa alihi wasohbihi wamawwalah., laahaula wala quwwata illabillah..., Amma ba'da.....

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.

- => sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan , Kepala Dinas , Kepala Kantor , Kepala Bagian Setda , dan Para Camat di lingkungan Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan..
- => Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, serta semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami menyampaikan Pendapat akhir ini, terlebih dahulu marilah kita, selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir mengikuti Rapat Paripurna DPRD ini , dalam keadaan sehat Wal afiat, tidak kekurangan suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita MUHAMMAD SAW , dan para shahabat , beserta seluruh keluarganya.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga menyampaikan "SELAMAT HARI GURU NASIONAL" 25 Nopember 2018 , berkat kegigihan dan perjuangan serta icklas guru , semoga kedepan tumbuh generasi yang handal , tangguh dan mulia , sebagai kader penerus perjuangan pembangunan negara dan bangsa kita tercinta .

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pendapat akhir kami, terhadap Rancangan Perda, tentang APBD Kabupaten Rembang tahun 2019 , setelah mendengarkan jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan oleh sdr. Bupati , dalam rapat paripurna ke I , pada hari Rabu , tanggal 14 Nopember 2018 , terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi , dan selanjutnya dilakukan pembahasan melalui rapat-rapat di Komisi , bersama dengan OPD terakait , Rapat Banggar dan Pimpinan Komisi , serta Rapat Banggar dengan TAPD , Alkhamdulillah semua dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan .

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang mendalam, dari hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah , tentang APBD tahun 2019 ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , ***Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrochiim menerima dan menyetujui*** , RAPERDA Tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ini , untuk

dijadikan PERDA , Tentang APBD Tahun Anggaran 2019 , dengan segala perubahan dan pergeseran yang ada , di dalam pembahasannya.

Di dalam Pendapat akhir ini , ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan , sebagai usulan dan masukan , antara lain sebagai berikut :

1. Terkait dengan Hibah kepada Undip, terutama hibah untuk Pembangunan Infra Struktur senilai 10 Milyard, yang mana anggaran tersebut masuk dalam pos Biaya Langsung, oleh karena itu nantinya menjadi bentuk hibah barang berupa Bangunan, sehingga pelaksanaan pembangunannya masih menjadi tanggung jawab Pemkab rembang. Sehubungan dengan hal tersebut , agar pelaksanaan pembangunannya tidak terlambat , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan, agar Pemkab Rembang segera melakukan persiapan Perencanaan yang matang untuk Pembangunan Infra struktur tersebut, bersama dengan calon Penerima hibah , sehingga nantinya Pembangunan tersebut , benar-benar sesuai dengan fungsi kebutuhan dan bermanfaat untuk proses pelaksanaan pendidikan Undip di Rembang.
2. Sesuai hasil rapat di tingkat Komisi bersama OPD , dalam pembahasan disepakati bahwa, program kegiatan yang tercantum didalam Rancangan APBD tahun 2019 ini, adalah prioritas kegiatan yang 95 % dapat dilaksanakan . Maka sehubungan dengan hal tersebut , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta kepada Pemkab , supaya komitmen yang sudah disepakati ini benar-benar diwujudkan , agar kepercayaan dan penilaian masyarakat terhadap kinerja Pemkab Rembang tidak selalu negatif.
3. Dalam rangka percepatan peningkatan Pendapatan Daerah, mengingat kedepan akan semakin berkembang industri di Rembang, dan untuk penanganan pendapatan dari sumber pajak dan retribusi daerah, serta untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dibidang pengelolaan pendapatn daerah , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan kepada Pemkab Rembang , agar Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang dipisahkan dengan DPPKAD dan dibentuk OPD sendiri dalam bentuk Badan.
4. Mengingat sisa waktu pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2018 tinggal beberapa hari berahir, Terutama terkait dengan kegiatan pelaksanaan fisik , baik untuk sarana Pembangunan Jalan ataupun Pembangunan Gedung , yang masih terlambat Progresnya, dan ditunjang dengan datangnya musim hujan , kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon, agar Pemkab melakukan upaya untuk bekerja lebih extra keras, supaya Pekerjaan dimaksud segera selesai dalam sisa waktu yang ada .

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 ini , Semoga apa yang kita rencanakan dapat berhasil dan bermanfaat, untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang tercinta.

Trima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Wallahul Muwaffiq Ilaa aqwamitthoorik

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

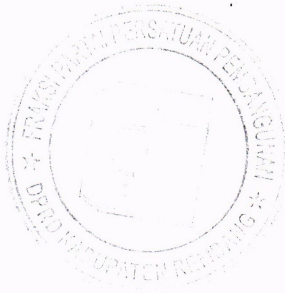
Rembang , 30 Nopember 2018

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



SUGIHARTO



SEKRETARIS



ZAIMUL UMAM NS

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG
APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2019**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 30 Nopember 2018

Dibacakan oleh : IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG
APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2019**

JUM'AT, 30 NOPEMBER 2018

Dibacakan oleh : IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staff
7. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahNya kita semua masih diberi kesempatan, kemudahan dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna hari ini. Kami fraksi demokrat mengucapkan selamat hari korpri yang jatuh pada tanggal 29 november kemarin, kami berharap korp pegawai negeri ini bisa selalu bekerja dengan baik dengan peningkatan kinerja karena tingkat kesejahteraan pegawai yang diberikan pemerintah sudah sungguh sangat baik.

Bupati, Wakil Bupati dan Sidang Dewan Yang Terhormat

Setelah kita melakukan serangkaian tahapan pembahasan mulai dari kuappas sampai dengan selesai pembahaan rapbd tadi malam, kami fraksi demokrat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada semua komisi dan banggar yang telah bekerja dengan baik serta kami memberikan penghargaan setinggi tingginya kepada pemerintah kabupaten rembang yang telah bisa menerima masukan, pendapat dan juga kebijakan terkait dengan Rapbd tahun 2019 dalam pembahasan dengan DPRD.

Sehingga bisa mengakomodir kegiatan kegiatan yang belum masuk dan juga mengurangi atau menunda kegiatan kegiatan yang sifatnya belum urgent. Misalnya pemenuhan sampai dengan 12 bulan belanja pegawai baik dalam belanja langsung maupun tidak langsung, komputer untuk unbk baik smp dan mts, dan juga menunda anggaran pembangunan pasar baru yang sempat menjadi sorotan publik karena masih pro kontra dengan masyarakat terutama pedagang.

Bupati, Wakil Bupati dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohiim kami Fraksi Demokrat **menyetujui** Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 untuk di tetapkan menjadi PERDA APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Adapun beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk menjadi perhatian dan di tindak lanjuti, yaitu :

1. Kami berharap pemerintah dalam penyusunan anggaran kedepan bisa lebih berpedoman pada peraturan yang mengatur tentang penyusunan anggaran.
2. Supaya pendapatan pemerintah kabupaten rembang bisa optimal terutama PAD kami mengusulkan agar bidang pendapatan di jadikan badan atau dinas saja.
3. Kami berharap tahun depan kawasan alun alun kota lasem agar ditata dan dijadikan ruang terbuka hijau karena saat ini kawasan alun alun lasem tersebut kelihatan sangat kumuh
4. Mohon insfrastruktur jalan yang masih rusak parah di prioritaskan dalam pemeliharaan tahun ini

Bupati, Wakil Bupati dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

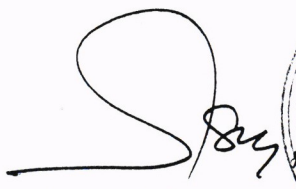
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

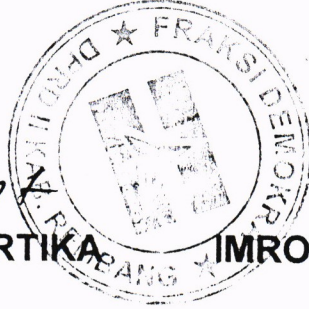
Rembang, 30 November 2018

**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

SEKRETARIS


EKA SISWA KARTIKA



IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pendapat Akhir
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019

disampaikan oleh muhammad asnawi
pada sidang paripurna dprd kabupaten rembang, jum'at, 30 November 2018

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang.

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan media, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia. untuk mensyukuri

Mengawali pendapat akhir ini perkenankan kami mengajak semua pihak untuk kembali menggelorakan semangat untuk saling menghargai. Dimulai dari hal hal kecil di sekitar kita, saling menghargai sesama tetangga, saling menghargai sesama profesi dan yang berbeda profesi, hingga saling menghargai pilihan yang. Sikap ini adalah cermin yang diteladankan oleh pendiri Negara tercinta, yaitu kebhinekaan. Inilah cermin bahwa kebhinekaan Nusantara menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia. Kita bisa belajar dari pesilat peraih emas yang spontan merangkul pak Prabowo dan pak Jokowi, yang kita semua sepatat ini luar biasa.

Pemahaman keberagaman itu sangat penting karena Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Terdiri dari 17 ribu lebih pulau, 516 kabupaten/kota. Indonesia mempunyai keanekaragaman yang tidak dimiliki negara manapun di dunia. Ada 700 suku bangsa dan 1.100 bahasa lokal, serta adat-istiadat yang berbeda. "Betapa kita ini sangat beragam,"

Kebhinekaan ini adalah pemberian dari Tuhan yang harus dijaga. Masyarakat harus bersatu dalam kehidupan yang rukun dan damai. "Hal-hal seperti ini yang harus disampaikan pada anak didik generasi kita, bahwa kita semua bersaudara."

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan selamat Hari Guru, 27 Nopember, bahwa kita bisa seperti ini karena jasa Guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Banyak tokoh dalam hari Guru menyampaikan pesan, agar para guru menanamkan nilai-nilai karakter pada anak didik, seperti kerja keras, kejujuran, kedisiplinan, optimisme. Juga, agar anak-anak mengerti tentang kebagusan budi pekerti, mengerti etika mengormati guru, orang tua, seniornya, karena ini nilai-nilai bangsa Indonesia.

Bahwa pelajaran seperti matematika, fisika, biologi, PKN, dan sebagainya memang diperlukan. Namun penanaman nilai-nilai pembentukan karakter juga diperlukan kita semua. Apalagi, kita sedang menghadapi persaingan global dengan bangsa-bangsa lain, sehingga karakter bangsa perlu ditanamkan sejak dini.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Kami Mulyakan

Media sosial saat ini sudah sangat terbuka dan tidak bisa kita hambat dengan cara apa pun. Sayangnya, medsos justru digunakan untuk saling hujat, menjelekkkan antar anak bangsa, saling memaki, membully, memfitnah, adu domba. ini semua sekarang ada di media sosial.

Salah satu cara untuk mencegah medsos yang digunakan untuk hal-hal negatif adalah menanamkan peserta didik dengan karakter dan nilai-nilai yang positif. Peran ini menjadi tugas bagi guru dan orang tua dalam mendidik siswa. Agar anak-anak kita, generasi muda kita diajak bermedia sosial yang santun, dengan tata nilai yang baik, ke arah positif. Sebagai warga Rembang kita beruntung karena memiliki tokoh ulama KH. Maimun Zubair dan KH. Ahmad Mustofa Bisri bersama para tokoh agama yang lain memberi kita teladan dengan ahlaqul karimah.

Media sosial seperti belajar tanpa guru, seperti mengambil air bukan dari sumber aslinya. Mereka yang belajar tanpa guru tak akan pernah mendapatkan HIKMAH yang selalu diajarkan oleh para guru. Pada akhirnya mudah terprovokasi dan tanpa belas kasihan menuduh memfitnah orang lain tanpa dasar yang kuat. Dunia maya seperti belantara dengan hukum rimba, siapa yang paling kuat memprovokasi itulah yang dianut.

Pimpinan Sidang, Saudara Bupati dan Hadirin Yang Kami Hormati

Kaidah umum dalam penataan RAPBD selalu didasarkan pada perencanaan yang baik dan terstruktur. Bahwa paparan gambaran umum kondisi daerah mencerminkan akan adanya solusi atas kondisi objektif Rembang yang sedang dihadapi. Jika paparan tentang gambaran umum ini tersaji secara objektif, lalu dirumuskan kerangka ekonomi dan keuangan yang berdasarkan kemampuan fiskal, maka sasaran prioritas pembangunan akan semakin mendekati pada tujuan pembangunan, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Rembang.

Selama Pemkab Rembang konsisten dengan penataan kawasan dan tataruang yang telah ditetapkan, jumlah kemiskinan yang valid dan akurat, potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang terpetakan, potensi konflik yang terus terpantau maka daya saing Rembang terhadap kabupaten/kota akan semakin membaik, baik di tingkat regional maupun nasional.

Kata kuncinya bukan pada program yang tampak wah tetapi tak berisi, terletak pada program-program sederhana yang menjawab kebutuhan masyarakat. Program yang tidak sekedar ingin tetapi program yang memang **dibutuhkan** Rembang. Hal ini

sesuai dengan tiga prioritas masalah utama yang akan dituntaskan di kabupaten Rembang, yaitu : Penurunan Kemiskinan (bukan penurunan angka kemiskinan), Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, dan Perwujudan *Good Governance*.

Dari informasi yang kami kumpulkan terdapat beberapa keluhan tentang kualitas infrastruktur. Lepas dari akurat atau tidaknya informasi tentang infrastruktur yang berkembang, sesungguhnya menjadi kewajiban pemkab untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada.

Infrastruktur yang baik dan berkualitas akan menjadi pondasi dan daya dukung tumbuhnya percepatan ekonomi. Kasat mata kita bisa melihat beberapa infrastruktur jalan, jembatan, bangunan dan yang lainnya sebenarnya kualitasnya dapat ditingkatkan, dengan tanpa melihat kewenangan pelaksana, tetapi melihat prioritas infrastruktur bagi masyarakat Rembang.

Dalam hal ini perlu dilakukan review terhadap semua proses infrastruktur yang meliputi; perencanaan, penganggaran, e-planning maupun e-budgeting, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasannya. Dalam hal ini misalnya bisa kita sampaikan informasi tentang study kelayakan yang kredibilas lembaganya diragukan atau DED sebuah program sangat mepet dengan waktunya. Ini tentu akan mengganggu proses pembangunan yang baik.

RAPBD tahun 2019 kabupaten Rembang memiliki konstruksi keuangan yang terdiri dari Pendapatan sebesar 1,824 trilyun dengan sumber pendapatan; PAD 291,8 milyar, Dana perimbangan 996.26 milyar, dan Lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar 536,14 milyar. Sementara belanjanya sebesar 1,867 trilyun yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 1.061 trilyun dan belanja langsung sebesar 805,36 milyar. Terdapat devisa sebesar (42,7) milyar yang ditutup melalui pembiayaan sebesar 49,4 milyar.

Secara umum RAPBD kali ini masih sedikit mengikuti alur asimetri anggaran, dalam merencanakan pendapatan selalu tidak maksimal dan sebaliknya dalam merencanakan belanja selalu maksimal. Hal ini dapat dilihat antara lain melalui menurunnya pendapatan setelah pembahasan, dan meningkatnya belanja setelah pembahasan meskipun turun-naiknya tidak signifikan, dan masih munculnya pembiayaan.

Dalam melakukan proyeksi pendapatan memilih prinsip konservatif, hampir tidak ada pendapatan yang signifikan dari PAD, Dana Perimbangan, Dan Lain lain Pendapatan Daerah yang sah. Ini artinya dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pos pos yang mendukung bertambahnya PAD masih dilakukan secara konservatif.

Sedang dalam belanja daerah, masih didominasi dengan belanja tak langsung sebesar 1,084 trilyun yang belanja pegawainya sendiri mencapai 646 milyar. Belanja langsungnya untuk belanja modal masih minim hanya sebesar 344 milyar dari belanja langsung sebesar 806 milyar atau sebesar 42% saja..

Kami berharap pada APBD selanjutnya belanja langsung yang berhimpit dengan manfaat kepada publik terus meningkat, terutama belanja modalnya bisa mencapai 60% dari total belanja langsung.

Dengan kondisi ini dan dimulai dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim*, FPKB dapat menerima RAPBD tahun 2019 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Perda APBD tahun 2019.

Sebagai penutup kami sampaikan salam damai untuk terus menjaga kebhinekaan kita, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Mayoritas menyayangi yang minoritas dan minoritas menghormati mayoritas.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 30 Nopember 2018
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa



Muhammad Imron
Ketua

Ilyas
Sekretaris



**FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

PENDAPAT FRAKSI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasional Demokrat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Atas hasil pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019.

Hari / Tanggal : Jumat/ 30 November 2018

Dibacakan oleh :

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!! Salam Restorasi.....

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)

Kab. Rembang

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang

Yang terhormat, Ka Dinas, Badan , Ka Kantor dan Camat se- Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan,

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena atas berkah rahmat serta inayahNya lah pada hari ini kita dapat menghadiri rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat, serta tidak lupa Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita menjadi umat yang diberikan syafaat olehnya di Yaumul Akhir kelak, Aamiin.

Mengawali penyampaian pendapat fraksi ini, izinkan kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat Fraksi PDI Perjuangan Nasdem Atas hasil pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019.

Sebelum kami menyampaikan pendapat kami atas hasil pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019, marilah kita bershalawat bersama (allahuma sholi alla saidina muhammad wa ala ali saidina muhammad) di hari lahir nya Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada bulan ini yaitu tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awwal 1440H.

Menanggapi hasil pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berpendapat :

- Kami menilai pembahasan APBD ditahun ini kurang cukup waktu, sehingga pembahasannya terkesan tergesa-gesa. Kami berharap pembahasan APBD dimasa yang akan datang dapat lebih dipersiapkan secara matang, sehingga akan menghasilkan Perda APBD yang berkualitas.
- PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Rembang menurut kami masih bisa ditingkatkan, utamanya di sektor pajak daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Rembang, Pemerintah Kabupaten Rembang harus lebih mengintensifkan pungutan sumber-sumber pendapatan daerah yang bisa memaksimalkan pendapatan pajak agar bisa efektif dan optimal dalam penyerapannya. Bahkan jika diperlukan Pemerintah Kabupaten Rembang perlu membentuk Badan/Dinas yang khusus menangani PAD (Pendapatan Asli Daerah).
- Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang khususnya di bidang Kesehatan, kami berharap untuk APBD yang akan datang bisa mengakomodir warga kurang mampu yang ber KTP Kabupaten Rembang wajib didaftarkan untuk mendapatkan BPJS, walaupun anggaran tidak mencukupi setidaknya bisa ditutup dengan dana CSR.

- Untuk Dinas Pariwisata agar segera melakukan M.O.U dengan Badan Usaha milik Desa Binangun mengenai Rest Area Wisata yang terletak di area binangun agar bisa dioptimalkan, sehingga kios-kios yang berada di area tersebut bisa secepatnya terisi dan digunakan. Hal ini juga untuk membantu meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Rembang.
- Dengan di sah kannya Perda APBD ini maka Pemerintah Kabupaten Rembang supaya bisa menjalankan anggaran di awal tahun anggaran sehingga penyerapannya bisa optimal dan tidak terkesan menumpuk diakhir tahun anggaran dan menimbulkan SILPA.

Demikian Pendapat Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, dengan mengucap Bismillahirohmanirohim, kami menyetujui RAPBD ini untuk disahkan menjadi Perda APBD tahun 2019...

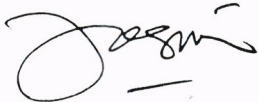
Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....Salam Restorasi.

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua



Jasmani



Sekretaris

Ali Ircham,ST

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

ATAS

**RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019**



REMBANG, 30 NOVEMBER 2018

Pendapat Akhir
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019

Disampaikan oleh H.Chasanuddin
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Kamis 30 November 2018

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya.....

Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;
Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri
Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI
Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat dilingkungan Pemkab.
Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;
Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas,
Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi, dalam kesempatan ini tidak lupa kami mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada ILLAHI ROBBI atas segala karunia dan nikmat NYA sehingga kita dapat melaksanakan rapat Paripurna ini. Sholawat dan salam teruntuk Baginda Nabi Muhammad SAW segenap para nabi dan rasul ILLAHI.

Hadirin sidang paripurna yang kami Hormati,

Setelah melalui berbagai tahapan dalam pembahasan Rencana APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019, dalam Rapat Komisi-Komisi, Rapat Banggar - TAPD, Rapat Banggar- Pimpinan Komisi dan Rapat Fraksi, maka kami sampaikan catatan penting sebagai berikut :

- Belanja pegawai pada Postur Belanja Langsung lebih dari 20 % sangatlah tinggi, kedepan Pemerintah Kabupaten Rembang perlu mengkaji dan mempertimbangkan pemberlakuan Tunjangan Kinerja agar belanja Honor-

honor pada belanja langsung bisa diminimalkan dan tidak terlalu membebani APBD.

- Meningkatnya Honor Tenaga Harian Lepas (THL) di TPI seharusnya juga di imbangi dengan meningkatnya kinerja sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi TPI.
- Program Bantuan Langsung non Tunai sampai saat ini belum terealisasi di Kabupaten Rembang, untuk itu Pemerintah Kabupaten Rembang harus berusaha keras untuk menjalankan Program tersebut, karena di Kabupaten lain sudah mulai terealisasi dan Program tersebut bisa membantu menurunkan tingkat kemiskinan.
- Pada Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi yang rencananya akan di bangun diatas tanah yang dalam proses dihibahkan ke UNDIP sebaiknya dipastikan Pembangunan selesai sebelum status tanah tersebut beralih menjadi Tanah milik UNDIP. Sehingga persoalan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari dapat di hindari.
- Dengan bertambahnya Belanja Daerah yang mencapai angka 1,867 Trilyun dan belum memasukan DAK serta Dana Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi sehingga masih ada kemungkinan Penambahan Pendapatan, maka diperlukan pengelolaan keuangan yang sangat cerdas agar semua anggaran yang tertuang di APBD tahun 2019 bisa terserap secara maksimal dalam kurun waktu 1 tahun kedepan. Kami selalu mengingatkan dan mendorong kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang agar kedepan dapat membuat perencanaan kegiatan Fisik minimal 50 % dari jumlah kegiatan Fisik ditahun berjalan agar Penyerapan Kegiatan Fisik bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, karena kejadian di Tahun 2018 ini juga hampir sama dengan Tahun 2017 yang lalu, bahwa kegiatan Fisik baru terlaksana di Bulan September. Semoga kita bisa mengambil Maanfaatnya dan dapat menjadikan evaluasi bagi bersama.

Demikian pendapat akhir kami, dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim*, kami menerima Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Perda. Atas segala

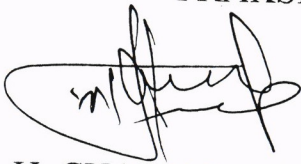
kekurangannya disampaikan permohonan maaf dan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu menunjukan jalan yang benar dan terbaik bagi kita semua.

Billahitaufig wal hidaayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 30 Nopember 2018

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG



H. CHASANNUDIN

Wakil Ketua



PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PENDAPAT FRAKSI KARYA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS PEMBAHASAN RAPERDA
ANGGAR AN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TA. 2019

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Hari Jum'at, 30 Nopember 2018

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Sdr. Wakil Bupati Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten Sekda dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang,
- Yang kami hormati Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini, Fraksi Karya Sejahtera mengajak hadirin semua untuk mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT seraya memanjatkan doa agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga apa yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridhoNya.

Dalam kesempatan ini perkenankanlah Faksi Karya Sejahtera mengucapkan “Selamat Hari Guru ke-75 yang jatuh pada tanggal 25 Nopember 2018, kita angajab mugri para dwija saged anggula-wenthah para siswa dados putra-putri ingkang lantip ing pikir, lembah ing manah saha luhur ing budi

pakarti”. Juga sekaligus mengucapkan “Selamat ulang tahun ke-47 KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) pada tanggal 29 Nopember 2018 kemarin, katur KORPRI utawi para pegawai negeri mugi pangabdian panjenengan mbekta manfaat kangge masyarakat, bangsa lan negara”.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Setelah melalui pembahasan antara komisi-komisi bersama OPD (organisasi perangkat daerah) terkait dan dilanjutkan pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD, maka saatnya kami menyampaikan Pendapat Fraksi Karya Sejahtera atas Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang TA 2019 sbb.

- Fraksi Karya Sejahtera mengharapkan, APBD TA 2019 nanti dilaksanakan secara optimal sehingga tidak menyisakan SILPA yang besar agar bisa memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Rembang. Disamping itu apabila pelaksanaan kegiatan yang sudah tercantum dalam APBD tahun berkenaan tidak bisa terlaksana secara optimal maka bantuan anggaran dari pusat maupun propinsi tahun berikutnya akan dikurangi.
- Fraksi Karya Sejahtera mengharapkan, setiap perencanaan suatu kegiatan harus disusun secara sempurna, misalnya pembangunan jalan hot mix yang ditinggikan 30 - 40 cm hendaknya diberi berm (bahu jalan) dan juga dibuatkan saluran air, agar tidak membahayakan pengguna jalan.

- Untuk menghadapi kemarau panjang, hendaknya BPBD diberi dana yang cukup sehingga masyarakat bisa terlayani secara baik.
- Dana pemeliharaan jalan TA 2019 hendaknya dipergunakan sepanjang tahun, sehingga pada akhir tahun tidak kewalahan dalam hal memperbaiki jalan yang rusak.
- Segera setelah APBD TA 2019 ini ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Rembang segera menindak lanjuti dengan langkah-langkah yang konkret. Sehingga pada awal tahun 2019 benar-benar pembangunan berjalan, jangan sampai “menumpuk” pada penghujung tahun atau akhir tahun.

Demikian Pendapat Fraksi Karya Sejahtera, dengan mengucap “Bismillahir rohmanir rohiim” FKS *menyetujui* Raperda APBD Kabupaten Rembang TA 2019 dengan belanja daerah sebesar Rp. 1.554.032.340.914,- (satu trilyun - lima ratus lima puluh empat milyar - tiga puluh dua juta - tiga ratus empat puluh ribu - sembilan ratus empat belas rupiah) untuk ditetapkan menjadi Perda APBD Kabupaten Rembang TA 2019.

Sebelum mengakhiri pendapat akhir ini perkenankanlah kami mengutip piweling Prabu Yudhistira ketika mewisuda Raden Parikesit sebagai penerus Kerajaan Amarta, yaitu “hamong, hamot lan hamemangkat”

- *Hamong*, seorang pemimpin harus sanggup berperan sebagai pamomong yaitu orang yang melayani bukan minta dilayani. Sebagai abdi masyarakat menuntut sikap tidak mudah mencela.

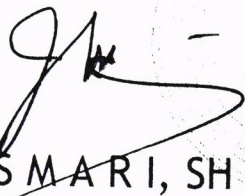
- **Hamot**, berarti pemimpin harus mampu menerima atau mewadahi semua hal yang didengar atau disampaikan oleh orang lain, mendengarkan keluhan dan aspirasi dari rakyat
- **Hamemangkat (saka tembung pangkat)**, sebagai seorang pemimpin harus menjaga martabat pribadi dan negara dengan menjaga tingkah laku yang baik dan menjadi panutan serta suri tauladan bagi rakyatnya.

Bila ada tutur kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pendapat Fraksi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan berkah dan bimbingan pada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang. Amien.

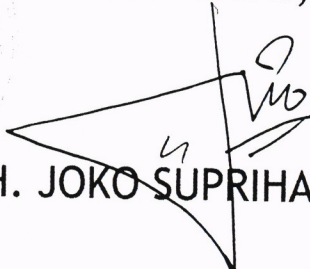
Rahayu ingkang sami pinanggih, wassalamu'alaikum wr. wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,


H. ISMARI, SH

Sekretaris,


H. JOKO SUPRIHADI, SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI HARAPAN

Sekretariat: Jl. Diponegoro No.88 Rembang



PENDAPAT FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG

atas
Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Rembang
Hari Jum'at, tgl. 30 Nopember 2018

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang terhormat.
- Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang yang terhormat
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang yang terhormat
- Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang yang terhormat
- Sdr-sdr. Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang terhormat .
- Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Pimpinan rapat dan hadirin yang terhormat.

Mengawali penyampaian pendapat fraksi ini, marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini. Sebelum menyampaikan pendapat fraksi, perkenankanlah kami mengucapkan “Selamat Hari Jadi KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) yang ke-47” tanggal 29 Nopember, semoga pengabdian dan amal bhakti para anggota KORPRI membawa manfaat dan berkah bagi seluruh masyarakat. Fraksi Harapan juga mengucapkan “Selamat Hari Guru ke-75” yang jatuh pada tanggal 25

Nopember yang lalu, semoga Bapak dan Ibu Guru bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, beriman dan berbudi-pekerti yang luhur

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Setelah melalui pembahasan antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Rembang, maka saatnya kami menyampaikan Pendapat Fraksi Harapan atas Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang TA 2019 sbb. |

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ibarat aliran darah dalam tubuh manusia, ia menentukan kuat lemahnya seseorang, menentukan sehat sakitnya manusia, menentukan keseimbangan jiwa dan raga seseorang, bahkan menentukan hidup matinya manusia; sedang Pemerintah Daerah bersama DPRD ibarat jantung yang mengolah dan memompakan darah keseluruhan tubuh. Maka bila terjadi gangguan dalam peredaran darah, seseorang akan sakit dan tidak bisa beraktivitas. Disinilah letak pentingnya sinergitas antara Pemda dengan DPRD.
- Kami menghimbau agar APBD TA 2019 nanti terlaksana secara optimal tanpa SILPA yang telalu besar, sehingga bisa memenuhi harapan masyarakat dan bantuan anggaran dari pusat maupun propinsi tahun berikutnya tidak dikurangi. ✓
- Fraksi Harapan menghimbau segera setelah APBD TA 2019 hari ini ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Rembang segera menyusun langkah yang nyata, sehingga pada awal

tahun 2019 pembangunan sudah berjalan dan tidak menumpuk pada akhir tahun. ✓

Demikian Pendapat Fraksi Harapan, dan kami menyetujui Raperda APBD Kabupaten Rembang TA 2019 ini untuk ditetapkan menjadi Perda APBD Kabupaten Rembang TA 2019. Apabila terdapat ucapan kami yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

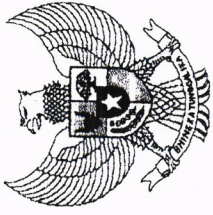
DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI HARAPAN

Ketua,


SUKARMA'IN

Sekretaris,

SAHNINGSIH, SE



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA RAPAT PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Rembang, 30 November 2018

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yth. - Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Ykh. - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Rembang.
- Ykh. - Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten Sekda dan Kepala Bagian di Lingkungan Setda Rembang.
- Ykh. - Kepala OPD se - Kabupaten Rembang.
- Ykh. - Camat se-Kabupaten Rembang, serta Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat *wal'afiat* pada acara Rapat Paripurna "Pembahasan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019".

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan ketetapan dari agenda yang telah disepakati bersama.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan
serta hadirin yang saya hormati,**

Pada kesempatan yang baik ini ijinlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada

pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat atas ketepatan waktu dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Tujuan utama Rancangan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 adalah Memperkuat Sinergitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah untuk Pengembangan Potensi Wilayah, serta pemenuhan Layanan Pendidikan dan Kesehatan guna Perwujudan Pemerintahan yang Amanah.

Secara berkelanjutan RAPBD ini mampu meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif guna mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Adapun ringkasan RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :
Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.511.479.792.071,00 (Satu triliun lima ratus sebelas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah).

Belanja Daerah sebesar Rp.1.554.032.340.914,00 (Satu triliun lima ratus lima puluh empat milyar tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah)

Defisit sebesar Rp.42.552.548.843,00 (Empat puluh dua milyar lima ratus lima puluh dua juta lima

ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah)

Dan ditutup dengan pembiayaan sebesar Rp. 42.552.548.843,00 (Empat puluh dua milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah)

Sehingga postur RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 balance.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 yang telah kita bahas dan setuju bersama semoga mampu memenuhi harapan serta cita-cita luhur yang telah kita harapkan bersama.

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua beserta seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang atas segala dukungan dan kerjasama yang baik selama ini. Semoga amal ibadah saudara dan kita semua mendapat imbalan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu Wata'ala. Amiin.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada acara Pendapat Akhir Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah Swt memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

PPP
Ace muslim per pas mempu keleluasan per panjang
go hari gospai melintasi tekan yang gaya
90 hari gospai melintasi tekan yang gaya
Demokrasi pedoman aturan tan sesuai visi mis
Calon wakil pelaksana manajemen?



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) beserta pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun dalam jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menyetujui Penetapan Program Propemperda Kabupaten Rembang Tahun 2019, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Program Propemperda sebagaimana dictum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 November 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG 

/s/ MAJID KAMIL M.Z

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Menyetujui Penetapan Program Propemperda Kabupaten Rembang Tahun 2019, sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Program Propemperda sebagaimana dictum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 November 2018

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

MAJID KAMIL M.Z

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
 KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANA AN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/INSTAN SI TERKAIT (8)	TARGET PENYAM PAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	LAMA		NA	Penjelasan atau keterangan			
1.	Rancangan Peraturan Daerah	Revisi RTRW Kabupaten Rembang 2011- 2031	Pola Ruang Struktur Ruang Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	-	v	Tahun 2019	v	-	DPUTARU BAPPEDA DINTANPAN DLH DINDAGKOP UKM BAGIAN HUKUM BAGIAN TAPEM	Tahun 2019	-
2.	Rancangan Peraturan Daerah	PD. Aneka Perusda Kabupaten Rembang	1. Penanaman Perusahaan 2. Penggunaan Laba 3. Masa Jabatan Direksi 4. Masa Jabatan Dewan Pengawas 5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR	v		Tahun 2019	v		Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Rembang DPMPTSP NAKER Kab. Rembang Inspektorat Kab. Rembang PD Aneka Perusda Unit Percetakan Daerah	Tahun 2019	Perda Pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah

3.	Rancangan Peraturan Daerah	PDAM Kabupaten Rembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Laba 2. Masa Jabatan Direksi 3. Masa Jabatan Dewan Pengawas 4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR 	v					Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Rembang DPMPTSP NAKER Kab. Rembang Inspektorat Kab. Rembang PDAM Kab. Rembang	Tahun 2019	Perda Pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum
4.	Rancangan Peraturan Daerah	Peraturan Daerah Pedoman Pengembangan Kawasan Perdesaan	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 83 dinyatakan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan antar desa dalam satu Kabupaten / Kota yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan	V		Tahun 2019	V		Bappeda, Dinpermades, DPUTARU, DPKP, Dintanpan, Dinlutkan, Dindindagkop dan UMK, DPMPTSP NAKER Bagian Tata Pemerintahan.	Tahun 2019	-

10.	Rancangan Peraturan Daerah	Sistim Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	V	Tahun 2019	V	Inisiatif	Tahun 2019	
-----	----------------------------	--	-------------------------------------	---	------------	---	-----------	------------	--

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG &

MAJID KAMIL,MZ



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Membaca : Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang diperlukan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 menjadi Peraturan Daerah;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Membaca : Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang diperlukan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 menjadi Peraturan Daerah;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Desa;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Wali Kota;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan:
1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 November 2018.
 2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 November 2018.
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 November 2018.

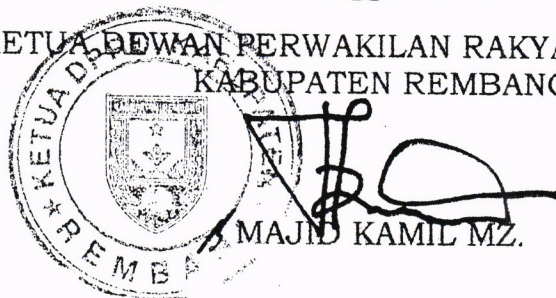
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut dalam laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 November 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



MAJID KAMIL MZ.